

**PEMBERIAN BANTUAN DANA PEMERINTAH KEPADA
MASYARAKAT NELAYAN KELURAHAN LERE
MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palu*

Oleh

**ARIEF RAHMAN
13.3.12.0004**

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pemberian Bantuan Dana Pemerintah Kepada Masyarakat Nelayan Kelurahan Lere Menurut Perspektif Ekonomi Islam” ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 08 Maret 2019 M
01 Rajab 1440 H

Penulis/Peneliti,

ARIEF RAHMAN
NIM: 13.3.12.0004

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Pemberian Bantuan Dana Pemerintah Kepada Masyarakat Nelayan Kelurahan Lere Menurut Perspektif Ekonomi Islam” oleh Arief Rahman NIM: 13.3.12.0004, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan.

Palu, 08 Maret 2019 M

Palu, 01 Rajab 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nasarudin, M.Ag.
Nip.1964 1231 1992 03 1043

Fadhliyah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I
Nip. 1983 0311 2015 03 2002

Mengesahkan:
Dekan FEBI

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I
Nip.1965 0505 199903 1 002

-

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Saudara Arief Rahman, NIM 13.3.12.0004 dengan judul “Pemberian Bantuan Dana Pemerintah Kepada Masyarakat Nelayan Kelurahan Lere Menurut Perspektif Ekonomi Islam” yang telah diujikan dihadapan dewan penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 4 November 2019 M yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 H. dipandang bahwa Skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan

DEWAN PENGUJI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
Ketua	Nur Syamsu, M.Si.	
Munaqisy I	Dr. Marzuki, M.H.	
Munaqisy II	Ahmad Arief, Lc., M.H.I.	
Pembimbing I	Dr. Nasaruddin, M.Ag.	
Pembimbing II	Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I.	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Dr. Hilal Malarangan, M.H.I
NIP. 19650505 199903 1 002

Dr. Sitti Musyahidah, M.Th.I
NIP. 19670710 199903 2 005



IAIN

Institut Agama Islam Negeri
Palu

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لِكِ يَوْمَ الدِّينِ يَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ
أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا
الضَّالِّينَ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.....

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya lah, Skripsi ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah di rencanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad Saw, serta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Drs.Abdul Rahman, S.Pd dan Hj. ST. Fatimah, S.Pd yang telah melahirkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Palu beserta segenap unsur pimpinan, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
3. Bapak Dr. H. Abidin, S.Ag., M. Ag selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang menyangkut akademik.

4. Bapak Dr. H. Kamaruddin, M. Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang menyangkut keuangan.
5. Bapak Drs. H. Iskandar, M.Sos.I selaku Wakil Rektor Bidang keahasiswaan dan kerja sama yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang menyangkut kemahasiswaan.
6. Bapak Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses perkuliahan.
7. Bapak Dr.Nasaruddin, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Ibu Fadhliah Mubakkirah, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi.
8. Bapak Nurdin, S.Pd, S.Sos, M.Com, Ph.D. selaku wakil Dekan Bidang Akademik Kemahasiswaan, Kelembagaan dan Kerjasama yang telah banyak membantu penulis dalam proses perkuliahan terutama dalam bidang akademik.
9. Ibu Dr. Ernawati, S.Ag. M.Ag selaku wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan terutama dalam bidang keuangan.
10. Bapak/Ibu dosen civitas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang sangat membantu penulis selama kegiatan perkuliahan.

11. Ibu Dr. Sitti Musyahidah M, Th.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam serta sekertaris jurusan bapak Nursyamsu, S.H.I yang telah banyak membantu penyusun baik urusan penyelesaian skripsi ini maupun urusan studi penyusun.
12. Bapak Sofyani, S. Ag selaku Kepala Perpustakaan beserta staf yang sangat membantu penulis memberikan izin kepada penulis untuk meminjam buku di perpustakaan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.
13. Teman-teman serta sahabat yang telah memberikan sumbangsi pikiran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu, 08 Maret 2019 M
01 Rajab 1440 H

Penulis

Arief Rahman
Nim. 13.3.12.0004

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	xii
ABSTRAK	xvii
BAB I . PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	5
E. Kerangka Berpikir.....	7
F. Garis-Garis Besar Isi	8
BAB II. KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Pemberian Bantuan Pemerintah	12
1. Pengertian Bantuan Pemerintah	12
2. Macam-Macam Bantuan Pemerintah	12
C. Masyarakat Nelayan.....	13
1. Pengertian Masyarakat	13
2. Pengertian Nelayan	14
3. Masyarakat Nelayan.....	15
4. Alam Pikir Nelayan.....	15
5. Klasifikasi Bentuk Nelayan.....	16
D. Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Nelayan	19
E. Bantuan Pemerintah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.....	20
F. Ekonomi Islam	21
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	26
B. Pendekatan Penelitian	27
C. Lokasi Penelitian.....	29
1. Lokasi Penelitian	29

2. Kehadiran Peneliti	30
D. Sumber Data.....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	31
F. Teknik Analisis Data.....	34
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	36

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kondisi Kelurahan Lere	38
1. Sejarah Singkat Kelurahan Lere	38
2. Kondisi Geografi	40
3. Kondisi Demografi	40
4. Kependudukan	40
5. Pendidikan	43
6. Kondisi Ekonomi, Sosial, Agama dan Budaya	45
B. Pemberian Bantuan Dana Pemerintah Kepada Masyarakat Nelayan ..	49
C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Bantuan Dana Pemerintah Kepada Masyarakat Nelayan	54

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Halaman
1. Pedoman Wawancara	70
2. Bantuan-Bantuan yang Diberikan Pasca Tsunami	74
3. Wawancara dengan Lurah	75
4. Wawancara dengan Penyuluh Perikanan	76
5. Wawancara dengan Masyarakat	77
6. Foto Bersa Penyuluh Perikanan, Masyarakat dan Polisi	78

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
1. Daftar Nama-Nama Kepala Desa atau Lurah	39
2. Jumlah Aparat Pemerintahan Kelurahan Lere	39
3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur	41
4. Pekerjaan Menurut Lapangan Usaha	42
5. Populasi Ternak	43
6. Prasarana Pendidikan Formal.....	44
7. Lembaga Pendidikan Non Formal	44
8. Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Lere.....	45
9. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku/Etnis	46
10. Prasarana Olahraga	47
11. Jumlah Beras Miskin.....	48
12. Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama	48
13. Nama, Lokasi, Tahun Berdiri dan Luas Masjid	49

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut :

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	a	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Bc
ت	ta	t	tc
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha	k	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	s	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	Y	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	ya	Y	ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (´).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	fathah	a	A
اِ	kasrah	i	I
اُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gambar huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	fathah dan yā'	ai	a dan i
اُو	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ: kaifa

هَوَّلَ: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ... اِي	fathah dan alif atau ya'	A	a dan garis di atas
يِ	kasrah dan ya'	I	i dan garis di bawah
وُ	dammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ	: mata
رَمَى	: rama
قِيلَ	: qila
يَمُوتُ	: yamutu

4. Tā'marbūtah

Transliterasi untuk tā'marbūtah ada dua, yaitu: tā'marbūtah yang hidup. Tā'marbūtah yang hidup (berharakat fathah, kasrah atau dammah) dilambangkan dengan huruf "t". Tā'marbūtah yang mati (tidak berharakat) dilambangkan dengan "h".

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta" marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tā'marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudal al-at fal
الْمَدِينَةُ الْفَادِلَةُ	: al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Tanda Syaddah atau tasydid dalam bahasa Arab, dalam transliterasinya dilambangkan menjadi huruf ganda, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbana
نَجَّيْنَا	: najjainah

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah

swt. = subhanahu wa ta'ala

saw. = sallallahu'alaihi wa sallam

H = Hijriah

M = Masehi

QS = Qur'an Surah al-Baqarah/2:4

ABSTRAK

Nama : Arif Rahman
NIM : 13.3.12.0004
Judul Skripsi : Pemberian Bantuan Dana Pemerintah Kepada Masyarakat Nelayan Kelurahan Lere Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Adanya bantuan pemerintah kepada masyarakat nelayan berupa alat tangkap, dapat membantu masyarakat nelayan dalam menjalankan profesinya. Pemberian bantuan dana kepada masyarakat nelayan Kelurahan Lere diharapkan dapat meningkatkan ekonomi. Pemberian bantuan dana kepada nelayan ini harus mendapatkan pengawasan baik pemerintah sebagai pemberi bantuan dan nelayan sebagai penerima bantuan yang ditinjau dari kacamata ekonomi Islam.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian tentang Pemberian Bantuan Dana Pemerintah Kepada Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan pengambilan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada banyak bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan Kelurahan Lere. Jumlah seluruh bantuan pada tahun 2018 adalah 30 buah yaitu ada pukat, pancing, jala, mesin genset dan katinting. Dalam pemberian bantuan ini dilakukan dengan cara pendataan, sosialisasi dan pembuatan kelompok, pengajuan bantuan serta pemberian bantuan yang telah di *acc*. Pemberian bantuan dilakukan dengan pengawasan namun, pada tahapan pendistribusian bantuan alat tangkap tersebut tidak dilakukan pengawasan serta jumlah bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah orang pada setiap kelompok. Secara keseluruhan, pemberian bantuan dana pemerintah kepada masyarakat Kelurahan Lere sesuai dengan perspektif ekonomi hanya pada tahapan pemberian bantuan dari penyuluh perikanan kepada masyarakat. Namun, pada tahapan pendistribusian jumlah bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah orang dari masing-masing kelompok serta tidak adanya pengawasan yang dituturkan terjadi spekulasi atau kecurangan. Hal ini tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

Dari kesimpulan yang diperoleh, maka penulis menyarankan kepada pemerintah yaitu, agar meningkatkan jumlah bantuan-bantuan yang diberikan untuk setiap kelompok. Lain halnya saran penulis kepada penyuluh perikanan adalah lebih meningkatkan pengawasan pada tahapan distribusi bantuan-bantuan tersebut. Sedangkan saran penulis kepada masyarakat adalah harus berlaku adil dalam penggunaan bantuan yang diberikan dari pemerintah dan menjaga sebaik-baiknya bantuan yang telah diberikan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Potensi perikanan yang cukup besar belum tentu dapat menunjang kehidupan nelayan akan terjadi peningkatan, karena faktor dari kurangnya modal serta kurangnya sumber daya manusia sehingga membuat kehidupan nelayan tidak meningkat dari tahun ke tahun. Akibatnya, potensi perikanan yang cukup besar belum dapat dikelola dengan baik. Adanya pelabuhan pendaratan ikan dapat mempermudah nelayan dalam pemasaran ikan hasil tangkapannya. Akan tetapi, dengan adanya pelabuhan pendaratan ikan tersebut belum juga dapat menunjang hasil tangkapan yang didapatkan oleh nelayan dapat dipasarkan dan dikelola secara maksimal sehingga perekonomian masyarakat nelayan terutama di Kelurahan Lere belum meningkat.

Adanya bantuan dari pemerintah dalam bidang perikanan baik dalam bentuk uang tunai, maupun bantuan dalam bentuk alat tangkap yang diberikan dapat membantu nelayan dalam meningkatkan pendapatan sehingga perekonomiannya dapat meningkat. Seperti yang dikemukakan oleh presiden Republik Indonesia bahwa akan mendukung serta memajukan segala kegiatan yang berhubungan dengan perikanan karena Indonesia merupakan negara perairan terpanjang namun, belum dapat dikelola maksimal. Adanya bantuan pemerintah ini diharapkan dapat menunjang perekonomian masyarakat pesisir pantai.¹

¹M. Amien Rais, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*, (Cet.1 Yogyakarta: Aditya Media, 1995), 4.

Menilik problem ekonomi yang sedang di hadapi Indonesia, maka perubahan yang paling urgen yang harus segera dilakukan adalah perubahan yang bersifat struktural. Perubahan ekonomi secara struktural berarti mengganti sistem ekonominya, dari sistem ekonomi yang bercorak kapitalistik menjadi sistem ekonomi yang baru. Tentunya dibutuhkan keberanian untuk melakukan perubahan menuju sistem ekonomi yang cocok dengan nilai-nilai luhur yang dimiliki rakyat Indonesia yang berbudaya, adanya kebersamaan dan religius. sistem ekonomi nasional Indonesia yang dipandang cocok adalah sistem ekonomi kerakyatan sebagai suatu sistem ekonomi berasas kekeluargaan yang demokratis dan bermoral dengan memihak pada sektor ekonomi rakyat. Untuk itu prasyarat sistem ekonomi nasional yang harus ada berkeadilan sosial adalah berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya.²

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu rambu-rambu hukum yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum yang dimaksud, baik bersifat pengaturan dari Al-Qur'an, Al-hadits, peraturan perundang-undangan (*ijtihad kolektif*), *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, maupun istilah lainnya dalam teori-teori hukum Islam.

Namun, cara manusia untuk memenuhi kebutuhan dan cara mendistribusikan kebutuhan dimaksud, didasari oleh filosofi yang berbeda antara seorang manusia dengan manusia yang lainnya, antara suatu kelompok manusia dan kelompok manusia lainnya, antara suatu negara dengan negara lainnya. Hal ini terjadi sebagai akibat perbedaan keyakinan agama, ideologi, budaya hukum,

²*Ibid*, 12.

kepentingan politik yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat.³

Dalam firman Allah SWT. dalam Al-qur'an yaitu jika seseorang dititipkan amanah yaitu baik berupa amanah bahasa maupun amanah berupa perbuatan, haruslah dilaksanakan sesuai aturan-aturan yang berlaku. Contohnya, yaitu jika seseorang dititipkan amanah berupa jabatan, maka haruslah amanah serta berlaku adil dalam memutuskan suatu perkara, artinya sama berat atau tidak berat sebelah. Firman Allah tersebut termaktub dalam surah An-nisa sebagai berikut.⁴

Firman Allah tersebut adalah sebagai berikut /QS. An-nisa (4): 58⁵

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

Dalam ekonomi Islam juga menjelaskan larangan-larangan dalam ekonomi Islam salah satunya yaitu, larangan tidak amanah atau menipu dalam ekonomi Islam di sebut dengan gharar, selain itu larangan lainnya dalam ekonomi Islam yaitu maisir, riba, haram dan zalim. Hukum asal transaksi dalam ekonomi Islam adalah mubah (dibolehkan), selama tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa jenis

³Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Ed. 1; Cet. 2 Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

⁴Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Cet.1 Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 202.

⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet 3, Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 119.

dan bentuk transaksi tersebut diharamkan. Prinsip ini menjadi dasar penting bagi pelaku ekonomi dalam melakukan aktivitas transaksi selama ia tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah syariah serta prinsip-prinsip dasar (*maqasid*) dalam Islam.⁶

Adanya bantuan pemerintah kepada masyarakat nelayan berupa alat tangkap, dapat membantu masyarakat nelayan dalam menjalankan profesinya. Pemberian bantuan dana kepada masyarakat nelayan Kelurahan Lere diharapkan dapat meningkatkan ekonomi nelayan. Pemberian bantuan dana kepada nelayan ini harus mendapatkan pengawasan baik pemerintah sebagai pemberi bantuan dan nelayan sebagai penerima bantuan yang ditinjau dari kacamata ekonomi Islam.

Berdasarkan dari penjelasan di atas, maka penulis sangat tertarik melakukan penelitian tentang Pemberian Bantuan Dana Pemerintah Kepada Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Menurut Perspektif Ekonomi Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang pemberian bantuan dana pemerintah Kelurahan Lere menurut perspektif ekonomi Islam.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka masalah yang timbul dapat dirumuskan sebagai berikut

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah bentuk pemberian bantuan dana pemerintah kepada masyarakat nelayan kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat.

⁶Mardani, *Hukum sistem ekonomi Islam*, (Ed.1; Cet.1 Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015), 77.

- b. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberian bantuan dana pemerintah kepada masyarakat nelayan kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat.

2. Batasan Masalah

Penelitian yang dilakukan hanya dibatasi pada masalah-masalah Pemberian Bantuan Dana Pemerintah Kepada Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pemberian bantuan dana pemerintah kepada masyarakat nelayan kelurahan Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat.
- b. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberian bantuan dana pemerintah kepada masyarakat nelayan kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah agar diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmiah bagi keilmuan masyarakat dalam memahami pemberian bantuan dana pemerintah kepada masyarakat nelayan kelurahan Lere kecamatan Palu Barat.

D. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah penulis dalam mengetahui makna yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis memaparkan penegasan istilah yang ada pada judul penelitian ini yang merupakan batasan yang sederhana dan merupakan

istilah yang penting dalam proposal ini, yaitu dengan menguraikan sebagai berikut:

1. Pemberian bantuan dana pemerintah.

Pemberian berasal dari kata dasar beri artinya memberikan sesuatu. Sedangkan bantuan adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk membantu memudahkan pekerjaan ataupun beban seseorang. Pemerintah adalah suatu organisasi yang bertugas sebagai badan eksekutif atau sebagai pelaksana dari pembangunan, peningkatan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya.⁷ Pemberian bantuan dana pemerintah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu baik nelayan bagang, nelayan pukot maupun nelayan pancing.

2. Masyarakat nelayan

Masyarakat nelayan merupakan masyarakat yang tinggal dan hidup di wilayah pesisiran. Wilayah ini adalah wilayah transisi yang menandai tempat perpindahan antara wilayah daratan dan laut atau sebaliknya . Di wilayah ini, sebahagian besar masyarakatnya hidup dari mengelola sumber daya pesisir dan laut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh itu, dari perspektif mata pencahariannya, masyarakat pesisir tersusun dari kelompok-kelompok masyarakat yang beragam seperti nelayan, petambak,

⁷Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, *Kearifan Tradisional Masyarakat Nelayan Kampung Batunderang*, (Selawesi Utara: Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, 2009), 44.

pedagang ikan, pemilik toko, serta pelaku industri kecil dan menengah pengolahan hasil tangkap.⁸

3. Perspektif ekonomi Islam

Perspektif ekonomi Islam menurut Sumar'in adalah ilmu yang mempelajari tentang usaha tangan manusia dengan menggunakan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai landasan dan aturan yang di pakai agar tidak melenceng dari ajaran agama Islam.⁹

E. Kerangka Berpikir

Kemiskinan merupakan suatu hal yang sudah sering terjadi di negara Indonesia. Karena kurangnya sumber daya manusia sehingga menyebabkan potensi kemiskinan di Indonesia meningkat terus menerus dari tahun ke tahun. Pemerintah memiliki wewenang untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui bantuan-bantuan.

Tingkat kemiskinan masyarakat pesisir terutama di kelurahan Lere kota Palu merupakan suatu kondisi yang terjadi karena kurangnya sumber daya manusia. Adanya bantuan dari pemerintah kepada masyarakat nelayan di kelurahan lere tidak serta merta membuat perekonomian masyarakat nelayan meningkat.

Pemberian bantuan dana yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat harus sesuai dengan aturan dan harus adanya pengawasan baik kepada

⁸Hasan Alwi dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan*, (Ed. Jakarta : Balai Pustaka, 2005), 945.

⁹Sumar'in, *Ekonomi Islam: sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Prespektif Islam*, (Ed.1; Cet.1 Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 3.

pemerintah maupun kepada masyarakat yang menerima bantuan tersebut. Dalam agama Islam juga mengatur rambu-rambu mengenai pemberian bantuan dana agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dan melanggar undang-undang dan aturan dalam agama Islam.

F. Garis-Garis Besar Isi

Sebagai gambaran umum isi skripsi ini, perlu dikemukakan garis-garis besar isi skripsi yang bertujuan agar menjadi informasi awal terhadap masalah yang diteliti. Skripsi ini terdiri atas lima bab, yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama sebagai pendahuluan mengemukakan beberapa hal yang terkait dengan eksistensi penelitian ini, yaitu latar belakang masalah yang menguraikan tentang penelitian lapangan. Yang penulis lakukan adalah penelitian lapangan yang menganalisis tentang *Pemberian Bantuan Dana Pemerintah Kepada Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Rumusan masalah mengemukakan fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang menguraikan tujuan dan manfaat dilakukan penelitian ini, penegasan istilah yang menguraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, serta garis-garis besar isi skripsi yang menguraikan gambaran umum tentang isi dari skripsi ini.

Bab kedua kajian pustaka, menguraikan tentang penelitian terdahulu, pemberian bantuan dana, masyarakat nelayan, bantuan pemerintah untuk masyarakat nelayan, bantuan pemerintah menurut perspektif ekonomi Islam, ekonomi Islam.

Bab ketiga menguraikan metode penelitian sebagai syarat mutlak keilmiahan penelitian yang akan penulis lakukan, yang mencakup uraian beberapa hal, yaitu jenis penelitian yang menguraikan maksud penelitian kualitatif yang ditetapkan sebagai jenis penelitian, lokasi penelitian dan kehadiran peneliti yang menguraikan indentifikasi, karakteristik dan alasan dipilihnya kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat Kota Palu, sebagai lokasi penelitian, serta uraian kehadiran penulis di lapangan sebagai peneliti yang bertindak sebagai pengamat penuh dan diketahuinya status penuh.

Bab keempat yang menguraikan tentang hasil dan pembahasan meliputi bagaimana gambaran umum tentang kelurahan Lere sabagai tempat meneliti mulai dari sejarah, keadaan geografis, topologi, hidrologi, kondisi penduduk, pendidikan masyarakat, keadaan sosial ekonomi dan budaya dari masyarakat kelurahan Lere. Menguraikan bagaimana tata cara pemberian bantuan dana pemerintah kepada masyarakat nelayan kelurahan Lere serta tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberian bantuan dana pemerintah kepada masyarakat nelayan.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran secara keseluruhan dari skripsi yang dibuat yaitu bagaimana pemberian bantuan dana pemerintah kepada masyarakat nelayan kelurahan Lere serta bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap pemberian bantuan dana pemerintah kepada masyarakat nelayan kelurahan Lere apakah sesuai dengan ekonomi Islam atau tidak serta terdapat saran-saran baik bagi masyarakat selaku pihak yang menerima bantuan tersebut maupun pemerintah sebagai pihak pemberi bantuan. Terdapat saran-saran membangun bagi masyarakat penerima bantuan pemerintah maupun pemerintah.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, dengan demikian penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan ini antara lain:

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudara Suparto Pari R. Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun 2004. Adapun judul penelitiannya, Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Palapi Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong (Paradigma ekonomi Islam). Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu, fokus permasalahan yang dibahas. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu, Studi kasus. Adapun hasil penelitiannya yaitu, permasalahan terberat terdapat pada pengembangan ekonomi masyarakat nelayan serta realisasi dari peningkatan pengembangan ekonomi masyarakat nelayan sesuai dengan prespektif ekonomi Islam.¹
2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudari Magfira Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tahun 2011 dengan judul penelitiannya, Peningkatan Ekonomi

¹Suparto Pari R., *Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Palapi Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong (Paradigma ekonomi Islam)*, (Palu: IAIN Palu, 2004), skripsi tidak dipublikasikan.

Masyarakat Nelayan Kayu Jati Melalui Bantuan Dana Pemerintah Menurut Perspektif Ekonomi Islam.

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu, subyek yang di bahas. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu, studi kasus. Adapun hasil penelitiannya yaitu, bantuan yang berupa uang tunai di setorkan langsung pada rekening penerima bantuan serta realisasi dari peningkatan ekonomi masyarakat nelayan melalui bantuan pemerintah sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.²

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh saudari Merlian Yulistriani Jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon tahun 2011. Dengan judul penelitian Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Dadap – Indramayu).

Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu, subyek yang akan di bahas. Sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilaksanakan yaitu, studi kasus. Adapun hasil penelitiannya yaitu, pemerintah daerah memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan melalui peningkatan derajat pendapatan, pendidikan, dan kesehatan.³

²Magfira, *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan Kayu Jati Melalui Bantuan Dana Pemerintah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Palu: IAIN Palu, 2011), skripsi tidak dipublikasikan.

³Merlian Yulistriani, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Dadap – Indramayu)*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2011), skripsi tidak dipublikasikan.

B. Pemberian Bantuan Pemerintah

1. Pengertian Pemberian Bantuan Pemerintah

Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah maupun pendapatan masyarakat yang berada dipesisir pantai untuk memenuhi kebutuhan maupun sosial ekonomi mereka maka pemerintah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan memberikan wewenang dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat yang sesuai dengan keahlian dan pekerjaan sebagai nelayan.⁴

Pemerintah membuat kebijakan untuk membantu masyarakat miskin yang ada di pesisir pantai dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Dengan adanya bantuan sosial sangat membantu masyarakat akan tetapi, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) tentang apa yang di berikan membuat masyarakat tidak paham untuk menggunakannya. Seharusnya pemerintah harus membuat suatu pelatihan dalam menggunakan alat-alat yang di berikan seperti cara pakai alat tangkap. Dengan adanya pelatihan membuat masyarakat menjadi paham dalam menggunakan alat tangkap yang moderen. Sering juga terjadi masyarakat menjualkan bantuan yang di berikan oleh pemerintah karena kurang kesadaran.⁵

2. Macam-Macam Bantuan Pemerintah

Dinas Kelautan dan Perikanan sangat berperan penting dalam menentukan nasib para nelayan karena semakin berjalannya waktu akan banyak perubahan dalam segi alat tangkap dan kapal-kapal besar dan moderen yang masuk atau

⁴Agustino, *Dasar-Dasar kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 23.

⁵Budi, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Media Perssindo, 2005), 35.

mengambil ikan. Ada beberapa jenis bantuan yang diberikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut.⁶

- a. BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)
- b. Kub (Kelompok Usaha Bersama)
- c. Kelompok Nelayan.

C. Masyarakat Nelayan

1. Pengertian Masyarakat

Masyarakat menurut Ajid Bin Tahir adalah sekumpulan manusia yang secara relatif mandiri, cukup lama hidup bersama, mendiami suatu wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian besar kegiatannya di dalam kelompok tersebut. Lain halnya, menurut Ralph Linton yang mengartikan masyarakat sebagai kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas yang dirumuskan secara jelas. Sedangkan menurut Peter L. Berger bahwa masyarakat adalah suatu keseluruhan kompleks hubungan manusia yang luas sifatnya pada suatu sistem interaksi atau tindakan yang terjadi minimal dua orang yang saling mempengaruhi perilakunya.⁷

Dari beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa masyarakat adalah satu kesatuan orang atau sekumpulan orang yang memiliki hubungan yang kompleks, budaya yang sama serta hubungan manusia yang luas sifatnya pada system interaksi atau tindakan.

⁶*Ibid*, 38.

⁷Arif Satria, *Pengantar sosiologi Masyarakat Pesisir*, (Ed.1; Cet. 2 Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015), 18.

2. Pengertian Nelayan

Menurut Hoeve mendefinisikan nelayan, sebagai orang yang secara aktif melakukan kegiatan menangkap ikan, baik secara langsung (seperti: penebar dan penarik jaring) maupun secara tidak langsung (seperti: juru mudi perahu layar, nahkoda kapal ikan). Lain halnya dengan R. Bintarto yang mengemukakan nelayan adalah mereka yang mata pencaharian pokoknya di bidang penangkapan ikan dan penjualan ikan yang hidup di daerah pantai untuk menangkap ikan diperlukan alat yang memadai misalnya : perahu, pancing, jala atau jaring. Sedangkan Nelayan menurut uu no.45/2009 - perikanan adalah orang yg mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa nelayan adalah orang yang mata pencahariannya di laut atau mencari nafkah dengan menangkap ikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

3. Masyarakat Nelayan

Menurut Kusnadi, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut.

Lain halnya menurut Imron, nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di

⁸Septi Rindawati, "Strategi Peningkatan Masyarakat Nelayan Di Kota Bengkulu, "Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius)", vol.2 no.3 (September 2012), 293. <http://news.palcomtech.com/wp-content/uploads/2013/04/SEPTI-JE02032012.pdf>. di akses tanggal 16 agustus 2018.

pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.⁹

Adapun wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, yang apabila ditinjau dari garis pantai, maka wilayah pesisir memiliki dua macam batas, yaitu batas sejajar garis pantai dan batas yang tegak lurus garis pantai. Dengan demikian, masyarakat pesisir adalah sekelompok manusia yang secara relatif mandiri, cukup lama hidup bersama, mendiami suatu wilayah pesisir, memiliki kebudayaan yang sama, yang identik dengan alam pesisir, dan melakukan kegiatannya di dalam kelompok tersebut.¹⁰

4. Alam Pikiran Nelayan

Dalam konteks hubungan eksploitasi sumber daya perikanan, sebagian besar masyarakat nelayan kita lebih menyukai hanya mengambil ikan, tanpa berfikir konservasi untuk kepentingan jangka panjang. Kecenderungan berperilaku demikian merupakan warisan dan mentalitas masyarakat (pemburu dan peramu). Seiring dengan kenaikan jumlah penduduk dan eksploitasi yang instan dalam pertumbuhan ekonomi kapitalistik, tekanan-tekanan terhadap sumber daya perikanan terus meningkat pula. Akibatnya, berkembanglah di beberapa kawasan tentang persaingan intensif dan konflik di antara kelompok-kelompok masyarakat nelayan dalam merebutkan sumber daya perikanan. Fluktuasi

⁹Mahfudlah Fajrie, *Masyarakat Pesisir wedung Jawa Tengah*, (CV: Mangku bumi Media, 2016), 12.

¹⁰*Ibid*, 10.

kebijakan ekonomi dan inflasi juga berimplikasi pada membengkaknya biaya produksi dan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.¹¹

Sepanjang upaya-upaya masih bisa dilakukan dan terbesit harapan masih berpeluang diraih, nelayan tetap memiliki daya juang yang tinggi untuk harus melaut dan bertahan hidup. Berbagai siasat dan keragaman beradaptasi diciptakan oleh nelayan untuk menghadapi kesulitan ekonomi sosial. Dasar motivasi lain adalah untuk mencapai kesuksesan hidup, yakni kemampuan menghimpun penguasaan sumber daya materi duniawi dan ukhrowi yang tertampakan, seperti tempat tinggal yang bagus, emas yang banyak, perabotan rumah yang mahal, skala usaha keluarga yang besar dan telah memenuhi ibadah haji. Symbol-simbol demikian yang menjadi basis untuk membangun status dan gengsi sosial, sebagai salah satu ciri utama kebudayaan masyarakat pesisir.¹²

5. Klasifikasi Bentuk Nelayan

Nelayan bukanlah suatu entitas tunggal, mereka terdiri dari beberapa kelompok.

- a. Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu:
 - 1) Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain.
 - 2) Nelayan juragan, adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain.

¹¹Kusnadi, *Membela Nelayan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 32.

¹²*Ibid*, 34.

- 3) Nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri, dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.
- b. Nelayan berdasarkan waktu yang digunakan dalam melakukan pekerjaan operasi penangkapan atau pemeliharaan, yaitu:
- 1) Nelayan atau petani ikan penuh, yaitu nelayan/petani ikan yang seluruh waktu pekerjaannya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan atau pemeliharaan ikan/binatang air lainnya ditanaman air.
 - 2) Nelayan atau petani ikan sambilan utama, yaitu nelayan atau petani ikan yang sebagian besar waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan operasi penangkapan atau pemeliharaan ikan atau binatang air lainnya atau tanaman air.
 - 3) Nelayan atau petani ikan sambilan tambahan yaitu nelayan atau petani ikan yang sebagian kecil waktu kerjanya digunakan untuk melakukan pekerjaan penangkapan atau pemeliharaan ikan/ binatang air lainnya atau tanaman air.
- c. Berdasarkan kepemilikan sarana penangkapan ikan, nelayan diklasifikasikan sebagai berikut:
- 1) Nelayan penggarap : nelayan penggarap adalah orang yang sebagai kesatuan menyediakan tenaganya turut serta dalam usaha penangkapan ikan laut, bekerja dengan sarana penangkapan ikan milik orang lain.
 - 2) Juragan atau pemilik : orang atau badan hukum yang dengan hak apapun berkuasa atau memiliki atas sesuatu kapal atau perahu dan alat-alat penangkapan ikan yang dipergunakan dalam usaha penangkapan

ikan, yang dioperasikan oleh orang lain. Jika pemilik tidak melaut maka disebut juragan atau pengusaha. Jika pemilik sekaligus bekerja melaut menangkap ikan maka dapat disebut sebagai nelayan yang sekaligus pemilik kapal.

d. Penggolongan nelayan dilihat dari kapasitas teknologi (alat tangkap dan armada), orientasi pasar, dan karakteristik hubungan produksi, yaitu:

- 1) *peasant-fisher* atau nelayan tradisional yang bersifat sub-sistem, alokasi hasil tangkapan yang dijual lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari (khususnya pangan) bukan diinvestasikan kembali untuk pengembangan skala usaha.
- 2) *post-peasant fisher*, nelayan yang telah menggunakan teknologi penangkapan ikan yang lebih maju seperti motor tempel atau kapal motor, beroperasi di wilayah pesisir, dan mulai berorientasi pasar. ABK tidak bergantung pada tenaga kerja keluarga.
- 3) *Commercial fisher* (nelayan komersil), nelayan yang telah berorientasi pada peningkatan keuntungan, teknologi penangkapan modern dan membutuhkan keahlian tersendiri untuk mengoperasikannya, dan
- 4) *Industrial fisher*, nelayan industri dengan ciri-ciri mengorganisasikan sisten agribisnis yang modern, relatif padat modal, kontribusi pendapatan yang lebih tinggi kepada pemilik dan awak, daripada yang didapat oleh nelayan tradisional, dan memproduksi ikan kaleng dan ikan beku.¹³

¹³Rahmatulliza, *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pelabuhan Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 38. Skripsi tidak dipublikasikan.

D. Bantuan Pemerintah untuk Masyarakat Nelayan

Pemerintah sebagai salah satu struktur dalam sistem politik yang merupakan penyelenggara dan pemantau kegiatan politik di suatu Negara. Hal ini berupa pelaksana dalam setiap kegiatan-kegiatan pemerintahan yang dapat berupa pelaksana kegiatan yang berupa pemberian bantuan-bantuan dana untuk masyarakat untuk peningkatan ekonomi serta menjalankan tugas sebagai pengawas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴

Pembangunan Indonesia selalu identik dengan tiga aspek kehidupan manusia yaitu, aspek ekonomi, aspek mentalitas dan aspek moral kerohanian dan keagamaan. Kehidupan ekonomi sekarang ini semakin hari semakin bertambah tetapi, tidak dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat kalangan bawah seperti masyarakat nelayan yang ada di pesisir pantai yang sumber daya perairan menunjang tapi kehidupan ekonomi belum terjadi peningkatan.¹⁵

Berbagai macam bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat nelayan untuk membantu memperbaiki perekonomiannya yaitu, memberikan bantuan berupa uang tunai, memberikan bantuan alat-alat tangkap serta memberdayakan nelayan berupa memberikan pelatihan-pelatihan kepada nelayan melalui dinas perikanan..

Segala tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini sedang dihadapi dengan sigap dari segala bidang, termasuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan

¹⁴Abd. Mu'in salim, *Fiqh siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Ed. 1; Cet.3 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 294.

¹⁵Machnun Husein, *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*, (Ed.1; Cet.1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986), 5.

ekonomi masyarakat terutama masyarakat nelayan. Sangat dapat dicermati bahwa kebijakan-kebijakan Pemerintah Indonesia saat ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini dapat berdampak positif bagi seluruh masyarakat.

E. Bantuan Pemerintah Menurut Perspektif Ekonomi Islam

Dalam perekonomian yang Islami, peranan pemerintah pada dasarnya memiliki rasionalitas yang kokoh. Dalam pandangan Islam peran pemerintah didasari oleh beberapa argumentasi, yaitu :

1. Derivasi dari konsep kekhalifahan.
2. Konsekuensi dari adanya kewajiban-kewajiban kolektif.
3. Adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah.¹⁶

Ulil Amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Sedangkan menurut istilah lainnya, pemerintah adalah seseorang yang di amanahi oleh Allah untuk memegang dan menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al-adl wal ihsan*) serta tata kehidupan yang baik (*hayyah thayyibah*) bagi seluruh umat. Jadi, pemerintah adalah agen dari Tuhan atau khalifatullah oleh merealisasikan falah. Pada hakikatnya, pemerintah dan masyarakat adalah dua institusi yang memiliki fungsi dasar sama, yaitu untuk merealisasikan segala kewajiban kolektif atau kewajiban publik dalam mewujudkan falah. Peran pemerintah ini berlandaskan pada alquran dan sunnah, baik secara eksplisit maupun implisit.¹⁷

¹⁶Anwar Abbas, *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), 14.

¹⁷*Ibid*, 19.

F. Ekonomi Islam

Para ahli telah banyak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam. Berbagai argumen meskipun saling berbeda formulasi kalimatnya, tetapi mengandung pengertian dasar yang sama. Yaitu seperti yang dikemukakan oleh Siddiqi bahwa ekonomi Islam adalah tanggapan pemikir-pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada zamannya. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan hadis, serta alasan dan pengalaman. Lain halnya dengan Hasanuzzaman yang mengemukakan bahwa ekonomi Islam merupakan suatu ilmu aplikasi petunjuk dan aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material agar memenuhi kebutuhan manusia dan agar dapat menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Sedangkan Chapra memberikan pengertian lain mengenai pengertian ekonomi Islam ia mendefinisikan bahwa ekonomi Islam merupakan cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka, yang sejalan dengan ajaran Islam, tanpa membatasi kebebasan individu ataupun menciptakan ketidakseimbangan makro dan ekologis.¹⁸

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi Islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-

¹⁸M. Sholahuddin, *Asas-asas Ekonomi Islam*, (Ed.1; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 5.

metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam relevan dengan fitrah. Para ahli ekonomi Islam telah merumuskan prinsip-prinsip ekonomi Islam, meskipun ada perbedaan dalam tata urutan tetapi substansinya satu sama lain. Dari sini akan disebutkan beberapa prinsip dasar terhadap rancang bangun ekonomi syariah. Menurut Muhammad dalam bukunya Abdul Manan, bahwa bangunan ekonomi Islam diletakkan pada lima Pondasi yaitu ketuhanan (*ilahiah*), keadilan (*al-'Adl*), kenabian (*al-Nubuwah*), pemerintahan (*al-Khalifah*), dan hasil (*al-Ma'ad*) atau keuntungan. Kelima pondasi ini hendaknya menjadi aspirasi dalam menyusun proposisi-proposisi atau teori-teori ekonomi Islam. Ekonomi berdasarkan syariah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan lahir dan berkembangnya agama Islam didunia. Ketika Rasulullah SAW berada di Makkah, kegiatan ekonomi belum sempat dilaksanakan sebab perjuangan Rasulullah SAW lebih dipusatkan pada ketauhidan. Setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah dan beliau diangkat sebagai pemimpin bangsa Madinah, dalam tempo yang sangat singkat beliau mampu melaksanakan pemerintahan dengan baik, membentuk institusi Negara yang diperlukan, mengatur politik dalam dan luar negeri dengan prinsip kebersamaan dan persaudaraan, membangun konstitusi Negara Madinah dan meletakkan dasar-dasar sistem keuangan Negara.¹⁹

Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berasal dari Al-qur'an, yaitu sebagai berikut:

¹⁹Abd. Manan, *Hukum Ekonomi syariah dalam Kemenangan Peradilan Agama*, (Ed. 1; Cet.1; Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2012), 5.

1. Prinsip Tauhid dalam konteks berusaha atau bekerja maknanya, dapat memberikan sprit kepada seseorang, bahwa segala bentuk usaha yang dilakukan manusia harus tetap bergantung kepada Allah.
2. Prinsip Keadilan yaitu, di antara pesan-pesan Alqur`an (sebagai sumber hukum Islam) adalah penegakkan keadilan. Seseorang disebut berlaku adil apabila ia tidak berat sebelah dalam menilai sesuatu, tidak berpihak kepada salah satu, kecuali berpihak kepada siapa saja yang benar sehingga ia tidak akan berlaku sewenang-wenang. Implementasi keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur sebagai berikut:
 - a. Riba merupakan salah satu rintangan yang sering kali menggiurkan banyak orang untuk mendapatkan keuntungan.
 - b. Maysir secara bahasa maysir semakna dengan qimar, artinya judi yaitu segala bentuk perilaku spekulatif atau untung-untungan. Islam melarang segala bentuk perjudian. Pelarangan ini karena judi dengan segala bentuknya mengandung unsur spekulasi dan membawa pada kemudahan yang sangat besar.
 - c. Gharar secara bahasa garar berarti bahaya atau resiko. Dari kata garar juga terbentuk kata *tagrir* yang berarti memberi peluang terjadinya bahaya. Dalam istilah fiqh muamalah, garar dapat memiliki konotasi beragam. Meskipun demikian, suatu hal yang pasti dan secara sederhana disimpulkan bahwa garar adalah terkait dengan adanya

ketidak jelasan akan sesuatu dalam melakukan transaksi. Islam melarang jual beli atau transaksi yang mengandung garar.

d. Haram kegiatan ekonomi, dalam sistem keuangan syariah, sebagai subordinasi kajian mu'amalah masuk ke dalam kelompok ibadah ammah.

Dimana, aturan tata pelaksanaannya lebih banyak bersifat umum.

3. Prinsip maslahat secara sederhana, maslahat bisa diartikan dengan mengambil manfaat dan menolak kemadaratan atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan, keselamatan, faedah atau berguna. Hakikat kemaslahatan adalah segala bentuk kebaikan dan manfaat yang berdimensi integral duniawi dan ukhrawi, material dan spritual, serta individual dan sosial.
4. Prinsip Ta'awun (Tolong-menolong) dalam hal ini, ideologi manusia terkait dengan kekayaan yang disimbolkan dengan uang terdiri dari dua kutub ekstrim; materialisme dan spritualisme. Materialisme sangat mengagungkan uang, tidak memperhitungkan Tuhan, dan menjadikan uang sebagai tujuan hidup sekaligus mempertahankannya. Serta Kutub lain adalah spritualisme (misalnya Brahma Hindu, Budha di Cina, dan kerahiban Kristen) menolak limpahan uang, kesenangan dan harta secara mutlak. Sementara Islam, berdasarkan beberapa dalil terkait uang dan yang semakna dengannya, menunjukkan bahwa Islam berada di jalan tengah antara dua kutub di atas.²⁰

²⁰Mohammad Mufid, *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*, (Ed.1; Cet.1 Jakarta: Kencana, 2016), 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang di teliti serta interaksinya dengan lingkungan. Tujuan penelitian lapangan adalah melakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu untuk memberikan gambaran lengkap mengenai subjek tertentu. Penelitian lapangan merupakan sebuah metode penelitian yang dilakukan secara intensif, rinci dan mendalam mengenai suatu kasus, gejala sosial, atau unit sosial tertentu yang spesifik. Kasus dalam hal ini dapat dimaknai sebagai sebuah konsep, aktivitas, waktu dan benda (hasil karya seseorang), kebijakan, kelas sosial, organisasi, negara, wilayah, atau fenomena lain yang spesifik. Nanang Martono menjelaskan bahwa penelitian lapangan memfokuskan diri untuk menggambarkan kasus tersebut dan menganalisisnya sehingga dapat menghasilkan temuan-temuan baru.¹

Jenis penelitian lapangan dalam penelitian ini berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyarakat nelayan Kelurahan Lere yang di hubungkan dengan prespektif ekonomi Islam sehingga mendapatkan temuan baru yaitu, bantuan dana pemerintah Kelurahan Lere untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan dalam hal ini bantuan yang

¹Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Ed.1; Cet.1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 88.

diberikan berupa bantuan dana tunai dan bantuan alat-alat penangkapan ikan seperti pukat dan pancing.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan Kualitatif, karena dapat mempermudah peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai fenomena-fenomena tentang aspek tertentu dengan melakukan teknik wawancara mendalam dan observasi terhadap suatu gejala, peristiwa, perilaku atau sikap tertentu dengan upaya mendekati informan. Menurut Strauss dan Corbin, bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif ini dapat dipergunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi, peristiwa tertentu, pergerakan-pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan dalam kekeluargaan.²

Dengan demikian, peneliti berusaha memberikan pemaparan tentang segala informasi yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk peningkatan ekonomi masyarakat nelayan Kelurahan Lere yang di hubungkan dengan prespektif ekonomi Islam sehingga mendapatkan temuan baru yaitu, bantuan dana pemerintah Kelurahan Lere untuk meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan dalam hal ini bantuan yang diberikan berupa bantuan dana tunai dan bantuan alat-alat penangkapan ikan seperti pukat dan pancing. Selain itu, ada juga bantuan berupa uang tunai sebagai modal.

²Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*, (Ed.1; Cet.3 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 212.

Menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Lexi J. Moleong, mendefinisikan metode kualitatif adalah “Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.”³

Sejalan dengan uraian diatas, *Moleong Miles dan Huberman*:

“Singkatnya, hal-hal apa yang terdapat dalam analisis kualitatif?Pertama, data yang muncul yang muncul berbentuk kata-kata dan bukan rangkaian angka.data itu mungkin telah dikumpul dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumentasi, pita rekaman) dan biasanya “diproses” kira-kira sebelum digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan atau ahli tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun dalam teks yang diperluas”.⁴

Alasan utama penulis memilih pendekatan kualitatif, disamping sebagai metode yang cocok dengan penelitian ini, juga karena penulis menganggap bahwa metode ini merupakan cara yang cocok untuk dilakukan yaitu dengan melakukan tatapan langsung dengan para informan yang tidak lagi dirumuskan dalam bentuk angka-angka cukup dengan cara observasi, dengan mengumpulkan data atau intisari dokumen.

Selanjutnya, sebelum turun kelokasi penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan survei peninjauan proses pencatatan data berjalan dengan lancar. Sesuai dengan judul skripsi (Penmerian Bantuan Dana Pemerintah Menurut Prespektif Ekonomi Islam). Maka peneliti perlu mengacu pada studi kasus, yaitu pelaksanaan penelitian dengan mencari dan mengetahui mengenai pemberian

³*Ibid*, 4.

⁴Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru*, (Cet.1 Jakarta: UI-Press, 1992), 15-16.

batuan dana pemerintah Kelurahan Lere dalam meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan.

C. Lokasi Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan digunakan sebagai tempat penelitian yang berjudul Pemberian Bantuan Dana Pemerintah Menurut Prespektif Ekonomi Islam. Penulis memilih lokasi ini yaitu Kelurahan Lere berdasarkan pada beberapa pertimbangan, antara lain:

- a. Lokasi penelitian ini merupakan kelurahan yang berada di dalam kota Palu, namun belum banyak yang ketahui jika di Kelurahan Lere masih banyak nelayan yang tingkat ekonominya rendah padahal sumber daya perairan di Kota Palu terbilang cukup untuk menanggulangi kehidupan nelayan, tapi ternyata tidak seperti kenyataannya.
- b. Belum ada yang melakukan penelitian mengenai peningkatan ekonomi masyarakat nelayan Kelurahan Lere melalui bantuan dana pemerintah.
- c. Tempatnya yang strategis karena tempatnya berada dekat dengan teluk palu serta tidak jauh dari tempat pendaratan ikan untuk memasarkan ikan hasil tangkapan yang di dapatkan serta tidak jauh keramaian namun, ekonomi masyarakat nelayan setempat tidak mengalami peningkatan.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, Penulis bertindak sebagai pengumpul data dan pengamat partisipan. Sebagai pengumpul data, Penulis bertindak sebagai pemberi informasi kepada sumber-sumber untuk memberikan kesediaannya sehingga dapat

memberikan informasi yang Penulis butuhkan. Dengan demikian berarti peneliti termasuk dalam instrumen atau alat dalam penelitian ini.

Penulis sebagai pengamat partisipan, Penulis bertindak hanya sebagai pengamat sementara terhadap aktivitas-aktivitas tertentu dari objek penelitian, oleh karenanya dalam mengamati objek penelitian, peneliti dibantu oleh instrumen-instrumen penelitian termasuk di dalamnya pedoman observasi. Interaksi dengan objek penelitian menjadi kunci utama untuk menemukan/menyaring informasi yang dibutuhkan.

Melakukan penelitian kualitatif peneliti diharuskan berada di lokasi penelitian secara maksimal karena penelitian kualitatif menuntut kehadiran peneliti di lokasi penelitian harus maksimal, sehingga upaya untuk mengumpulkan data yang akurat dapat tercapai. Sebelum penelitian dilakukan terlebih dahulu peneliti meminta izin kepada ketua adat dan kepala desa dengan memperlihatkan surat izin melakukan penelitian yang dikeluarkan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Hal ini dimaksudkan agar kehadiran peneliti di lokasi penelitian dapat diterima dengan resmi oleh pihak kampung sehingga pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan lancar dan data yang diperoleh lebih akurat dan valid.

D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder atau sumber data yang didapatkan dari luar wawancara dan sumber yang didapatkan dari luar wawancara atau dari buku-buku pustaka.

1. Data primer

Data primer adalah Data yang diperoleh secara langsung yaitu dengan melakukan wawancara dan pengambilan dokumentasi-dokumentasi secara langsung kepada narasumber atau informan yang dipilih dilapangan. Sumber data yang dimaksud adalah para informan dan dapat dikatakan sebagai populasi. Berdasarkan Hal ini dapat disimpulkan bahwa sampel yang baik yaitu memiliki populasi atau representasi artinya yang menggambarkan keadaan populasi atau mencerminkan populasi secara maksimal. Data primer di dapatkan dengan melakukan wawancara dengan pemerintah kelurahan Lere dan masyarakat yang nelayan kelurahan lere yang menerima bantuan baik berupa uang tunai maupun berupa alat tangkap.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pustaka. Data sekunder bisa berupa data yang diperoleh melalui dokumen dan catatan-catatan yang berkaitan dengan objek penelitian yang menunjukkan gambaran umum tentang peningkatan ekonomi masyarakat nelayan di kelurahan Lere melalui bantuan dana pemerintah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian yang digunakan peneliti adalah pertama dengan melakukan observasi atau pengamatan di lokasi penelitian, kedua melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang peningkatan ekonomi masyarakat nelayan kelurahan Lere melalui bantuan dana kelurahan Lere.

1. Observasi,

Observasi adalah di mana peneliti mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan. Hal ini dilakukan karena peneliti mengamati bagaimana tata cara pemberian bantuan dana kepada masyarakat nelayan serta bagaimana peranan pemerintah kelurahan Lere dalam pemberian bantuan dana tersebut. Hal ini bertujuan memberikan arah bagi peneliti dalam hal mengumpulkan data. Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap objek yang diteliti. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Cholid Narbukon, alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dalam mencari secara sistematis gejala-gejala yang yang diselidiki.⁵

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁶

Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di kelurahan Lere dengan tujuan untuk melakukan negosiasi serta memberitahukan kepada pemerintah untuk mempersiapkan data-data yang akan di berikan kepada peneliti serta memberitahukan kepada masyarakat nelayan kelurahan Lere yang menerima bantuan agar mempersiapkan diri saat peneliti melakukan wawancara nanti guna mengambil informasi serta data-data yang menyangkut dengan judul penelitian

⁵Cholid Narbukon, Abu Achmadi, *metodologi penelitian*, (Cet.4 Jakarta: PT. Bumi aksara, 2002), 70.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 145.

yaitu, “Pemberian Bantuan Dana Pemerintah Kepada Masyarakat Nelayan Di Kelurahan Kampung Lere Melalui Menurut Prespektif Ekonomi Islam”.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu teknik dalam memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara lisan tanya jawab dan bertatap muka antara peneliti dan informan. Dengan menggunakan kuisioner untuk menjadi pedoman wawancara, metode ini digunakan untuk mengetahui informasi secara langsung dan mendalam terhadap objek yang diteliti, yang selanjutnya di tuangkan dalam bentuk transkrip dari hasil wawancara yang dilakukan.

Sutrisno hadi (1986) mengemukakan bahwa anggapan yang di perlukan di pegang oleh peneliti dalam menggunakan metode wawancara adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tau dirinya sendiri.
- b. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat di percaya.
- c. Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang di maksudkan oleh peneliti.⁷

Adapun yang akan di wawancarai oleh penulis yaitu:

- a. Lurah kelurahan Lere.
- b. Masyarakat nelayan kelurahan Lere yang menerima bantuan baik berupa bantuan dana tunai maupun bantuan berupa alat tangkap.

⁷*Ibid*,138.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan memahami dokumen penting yang menunjang kelengkapan data seperti mencatat tata cara pemberian bantuan dana pemerintah kelurahan Lere kepada masyarakat nelayan, bantuan-bantuan yang telah di berikan kepada masyarakat yaitu berupa dokumentasi bantuan alat-alat tangkap dan dokumentasi saat melakukan wawancara dengan pemerintah kelurahan serta melakukan dokumentasi kantor kelurahan Lere.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁸

Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah:

1. Reduksi Data

Menurut Matthew B. Milos dan A. Michel Huberman bahwa reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan data “kasar” muncul dari catatan.⁹

⁸Sugiyono, *Memahami Penelitian Kuantitatif*. (Cet. 1; Bandung: Alfabeta, 2012), 89.

⁹Matthew B. Millos, et al, *Qualitative data Analisis diterjemahkan oleh Tjetjep Rohidi dengan judul Analisis data Kualitatif, buku sumber tentang metode baru*, (Cet. 1; Jakarta: UI-Press, 1992), 16.

Reduksi data diterapkan pada hasil observasi, wawancara dan angket. Hal ini dimaksudkan untuk menghilangkan kata-kata yang dianggap penulis tidak signifikan bagi penelitian ini.

2. Penyajian Data

Penyajian data maksudnya adalah menyajikan data yang telah direduksi dalam model-model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut. Menurut Matthew B. Milos dan A. Michel Huberman bahwa:

“Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data, kami membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut”¹⁰

3. Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data artinya memeriksa kembali data yang telah disajikan sehingga penyajian dan pembahasan lebih akurat. Teknik verifikasi data dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu:

- a. Deduksi; analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induksi; analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komparatif; analisis yang membandingkan beberapa data untuk mendapatkan kesimpulan persamaan maupun perbedaan.

¹⁰*Ibid* 17.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Sebagaimana dikemukakan oleh Lexi J. Moleong dalam buku “metodologi penelitian kualitatif” bahwa: Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas) menurut versi “positivisme” dan disesuaikan dengan tuntunan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri.¹¹

Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan berdasarkan pada sejumlah kriteria keabsahan data yang biasa digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keterlihatan (*transferrability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

Selanjutnya untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh maka dilakukan melalui cara triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data.

Denzin dan Moleong, membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori.

1. Triangulasi dengan sumber; berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
2. Triangulasi dengan metode; terdapat dua strategi, yaitu: (a) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan, (b) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
3. Triangulasi penyidik; ialah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Memanfaatkan pengamat lainnya membantu mengurangi

¹¹Morrisan, dkk, *Metode Penelitian Survei*, (Ed.1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 27.

kemencengan?dalam pengumpulan data. Atau dengan cara lain ialah dengan membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya.

4. Triangulasi dengan teori; hal ini dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori dan dinamakan penjelasan banding (*rival explanation*).¹²

Di samping Penulis menggunakan berbagai kriteria dan triangulasi untuk pengecekan keabsahan data di atas juga Penulis melakukan pembahasan melalui diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Hal ini digunakan karena merupakan salah satu teknik untuk pengecekan keabsahan data dalam suatu penelitian. Diskusi dengan rekan-rekan sejawat dilakukan untuk mempertahankan agar Penulis tetap tegar mempertahankan sikap terbuka dan kejujuran dari data yang dikumpulkan serta membantu Penulis untuk tetap konsisten dan fokus terhadap pokok permasalahan yang dibahas.

¹²Nasution, *Metode Research*, (Ed.1; Cet.2 Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 120.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Kondisi Kelurahan Lere*

1. Sejarah Singkat Kelurahan Lere

Pemilihan daerah untuk pembentukan pemerintahan di Negara kita pada umumnya didasarkan secara konvensional, artinya bahwa pemilihan daerah yang terbentuk komunitas sosial secara turun temurun. Awalnya Kelurahan Lere adalah desa Lalere yang pada saat sebelum pendudukan Belanda bernama desa Panggona dan pada saat sesudah pendudukan Belanda dan masyarakat melihat di sepanjang pantai desa Panggona banyak tanaman Lalere (bahasa Indonesianya *daun katang-katang atau batata pantai* bahasa latin *Impomcaepes-Caprae*) maka mereka mengganti desa Panggona menjadi desa Lere karena kalau desa Panggona, karena tidak sesuai dengan identitas desa tersebut yang di sepanjang pantai terdapat tanaman Lalere bukan tanaman Panggona.

Kemudian pada tahun 1981 desa Lere mengalami perubahan status menjadi Kelurahan Lere, pada saat itu sesuai dengan Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : 1072/Kep/1981 tepatnya di Jakarta pada tanggal 05 Mei 1981 menetapkan bahwa pengangkatan kepala Kelurahan atau perangkat Kelurahan menjadi PNS.

Itulah sejarah singkat desa Lere berubah status menjadi Kelurahan Lere dimana sejak terbentuknya menjadi Kelurahan seperti sekarang ini. Adapun nama-nama yang pernah menjabat sebagai Kepala desa dan Lurah Kelurahan Lere adalah sebagai berikut.

Daftar Nama-Nama Kepala Desa atau Lurah

No.	Nama	Tahun	Jk	Jabatan	Ket.
1.	ANDI TJOJO PARAMPASI	-	L	KADES	
2.	LAMANIU	-	L	KADES	
3.	ANDI LATJE DJANGGOLA	-	L	KADES	
4.	YUSUF	-	L	KADES	
5.	HAMLI PARUDJU	-	L	KADES	
6.	LAMAMING HUNA	-	L	KADES	
7.	ALWI PARUDJU	-	L	KADES	
8.	J.A. LAMATAIYA	-	L	KADES	
9.	ISMUDIN ARSYAD	1984-1985	L	LURAH	
10.	TASMAN LAHAKI	1985-1990	L	LURAH	
11.	SUTOMO H. MUHAMMAD	1990-1991	L	LURAH	
12.	DJONI DJANGGOLA	1991-1996	L	LURAH	
13.	PAWELLANGI ANDI SUI	1996-1998	L	LURAH	
14.	ISMU OSKAR	1998-2000	L	LURAH	
15.	MUHAMMAD IKBAL, S. Sos	2000-2002	L	LURAH	
16.	ANDI HAJIDIN, SE	2002-2006	L	LURAH	
17.	ANDI BAHAR PARAMPASI	2006-2012	L	LURAH	
18.	MUHAMMAD, S.Sos	2012-2013	L	LURAH	
19.	MARSUKI, SE., M.Si	2013-SEKARANG	L	LURAH	

Sumber: Profil Kelurahan Lere, 2009

Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan, Lurah Kelurahan Lere dibantu oleh beberapa aparatur pemerintahan Kelurahan Lere yang sesuai dengan bidang-bidangnya masing-masing sehingga dapat meringankan beban dan tugas Lurah dalam menjalankan pemerintahan. Adapun jumlah aparat pemerintahan Kelurahan Lere adalah sebagai berikut.

Jumlah Aparat Pemerintahan Kelurahan Lere

No.	Jabatan	Jumlah Orang		Ket.
		L	P	
1.	Lurah	1		
2.	Sekretaris Lurah		1	
3.	Kepala Seksi	3	1	
4.	Bendahara		1	
5.	Staf	4	3	
6.	Linmas	2		
TOTAL		16		

Sumber: Profil Kelurahan Lere, 2009

2. Kondisi Geografi

Luas wilayah kelurahan Lere terdiri dari daratan, dengan ketinggian 20 m di atas permukaan laut, sebelah gunung sepanjang 2 km, suhu udara 25-30 °C, tekanan udara 1013-1015 mb, kelembapan udara 50-68 %, penyinaran matahari 45-70 %, curah hujan 2-7 mm, kecepatan angin 3-9 knots, arah angin terbanyak Barat Laut. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Lere adalah sebagai berikut.

- a. Sebelah utara berbatasan dengan teluk Palu.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Baru dan kelurahan Siranindi.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Silae dan Kelurahan Kabonena.
- d. Sebelah timur berbatasan dengan sungai Palu.

3. Kondisi Demografi

Perkembangan Kota Palu membawa konsekwensi logis terhadap wajah Kelurahan Lere. Potensi wilayah dan keramahan warga yang lebih dahulu menetap merupakan faktor pendukung bagi pengembangan pemukiman atau perumahan. Beberapa developer kemudian memanfaatkan potensi tersebut dengan membangun perumahan di wilayah kelurahan Lere, sehingga perkembangan perumahan dan penduduk begitu pesat. Kompleks perumahan di wilayah kelurahan Lere adalah kompleks perumahan terbesar di Kota Palu bahkan di Provinsi Sulawesi Tengah. Hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap jumlah penduduk.

4. Kependudukan

Jumlah penduduk kelurahan Lere pada tahun 80-an hanya dihuni oleh kurang lebih 91 kepala keluarga (700 jiwa) namun, sampai dengan tahun 2008

telah mencapai 2174 kepala keluarga (8596 jiwa) yang terdiri dari 4717 orang laki-laki dan 4586 orang perempuan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan umurnya adalah sebagai berikut.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur

Umur		Jumlah	
		L	P
0 – 10	Tahun	1.000 Orang	768 Orang
11 – 20	Tahun	873 Orang	1.000 Orang
21 – 30	Tahun	1.176 Orang	1.000 Orang
31 – 40	Tahun	500 Orang	909 Orang
41 – 50	Tahun	700 Orang	445 Orang
51 – 60	Tahun	1.000 Orang	595 Orang
> 60	Tahun	195 Orang	200 Orang
Total		9.303	Orang

Sumber: Profil Kelurahan Lere, 2009

Melihat luas wilayah dan jumlah penduduk, maka kepadatan penduduk di wilayah kelurahan Lere adalah 84 orang/Ha. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk adalah 15-12 % per tahun, dengan rata-rata usia harapan hidup adalah 50 tahun.

Secara keseluruhan warga masyarakat kelurahan Lere yang masuk dalam kategori usia atau angkatan kerja (diluar Ibu Rumah Tangga), telah memiliki lapangan pekerjaan baik yang mempunyai penghasilan tetap maupun tidak tetap. Wilayah kelurahan Lere adalah daratan dan laut yang awalnya dimanfaatkan oleh masyarakat untuk lahan pertanian dan perikanan.

Berbagai pekerjaan atau mata pencaharian atau profesi yang digeluti oleh penduduk kelurahan Lere. Adapun pekerjaan atau mata pencaharian atau profesi menurut lapangan usaha dan keahlian dari masyarakat di kelurahan Lere adalah sebagai berikut.

Pekerjaan Menurut Lapangan Usaha

Mata Pencaharian Pokok	Jumlah	
Pegawai Negeri	519	Orang
TNI/Polri	43	Orang
Pensiunan PNS/Purnawirawan	112	Orang
Karyawan Swasta	257	Orang
Dokter	3	Orang
Mantri/Bidan	5	Orang
Pengusaha	50	Orang
Montir	28	Orang
Sopir	42	Orang
Kusir	107	Orang
Ojek	210	Orang
Petani	38	Orang
Peternak	16	Orang
Penjahit	29	Orang
Tukang Kayu/Batu	130	Orang
Buruh	91	Orang
Pedagang	123	Orang
Pelajar Mahasiswa	1.858	Orang
Karyawan Buruh	15	Orang
Nelayan	529	Orang
Tukang Las/Pandai Besi	8	Orang
Penata Rambut	7	Orang
Buruh Nelayan/Perikanan	78	Orang
Buruh Harian Lepas	145	Orang
Anggota Dewan Kota	1	Orang
Anggota Dewan Provinsi	2	Orang
Imam Masjid	6	Orang
Tukang Batu	79	Orang
Tukang Kayu	51	Orang
Guru	110	Orang
Dosen	34	Orang
Anggota DPR Kabupaten Donggala	6	Orang
Dokter	3	Orang
Wiraswasta	300	Orang
Perangkat Desa	1	Orang
Pedagang	82	Orang
Pengacara	2	Orang
Total	5.120	Orang

Sumber: Profil Kelurahan Lere, 2009

Tabel diatas menunjukkan data mata pekerjaan seluruh masyarakat kelurahan Lere kota Palu pada tahun 2009. Data diatas menunjukkan bahwa banyaknya buruh nelayan adalah sebanyak 78 orang. Namun, setelah kejadian gempa dan tsunami tahun 2018 mengakibatkan banyak masyarakat yang harus kehilangan pekerjaannya sehingga masyarakat yang menjadi nelayan bertambah menjadi 200 orang pada tahun 2019.

Sulitnya mendapatkan air yang tentunya sangat berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh maka perlahan-lahan terjadi alih fungsi menjadi perkantoran dan pertokoan. sebagai upaya yang dilakukan untuk mensukseskan salah satu terobosan Walikota Palu, masyarakat kelurahan Lere yang sebagian besar menempati rumah sangat sederhana dengan terbatasnya lahan pekarangan, menggalakkan tanaman pot (potnisasi) baik berupa bunga dengan berbagai jenisnya maupun tanaman kebutuhan dapur seperti cabe, tomat serta tanaman obat-obatan lainnya.

Selain itu, masyarakat kelurahan Lere juga memelihara hewan ternak seperti sapi, kambing, kuda, ayam potong dan itik. Adapun populasi dari hewan ternak yang dimiliki oleh masyarakat kelurahan Lere adalah sebagai berikut.

Populasi Ternak

No	Jenis Ternak	Jumlah (Ekor)
1.	Sapi	95
2.	Kambing	285
3.	Kuda	56
4.	Ayam Potong	303
5.	Itik	28
Total		767

Sumber: Profil Kelurahan Lere, 2009

5. Pendidikan

Tingginya tingkat kesadaran terhadap pentingnya pendidikan dalam era yang semakin global dan kompetitif serta didukung kemampuan ekonomi yang memadai membuat masyarakat kelurahan Lere berupaya untuk mencapai jenjang pendidikan yang maksimal. Hal ini bukan hanya untuk anak usia sekolah tetapi juga para orangtua utamanya di kalangan Pegawai Negeri Sipil/Guru/Dosen. Karena tingkat kesadaran masyarakat mengenai pendidikan tinggi sehingga lembaga pendidikan yang tersedia di Kelurahan Lere saat ini sampai perguruan tinggi. Adapun prasarana pendidikan formal yang ada di Kelurahan Lere yang ada saat ini adalah sebagai berikut.

Prasarana Pendidikan Formal

No.	Nama Lembaga Pendidikan	Tahun Berdiri	Jumlah Guru (Orang)	Jumlah Murid (Orang)
1.	SD 1 Lere	1975	8	194
2.	SDN Inpres 2 Lere	1981	9	263
3.	SLB A,B,C,D Muhammadiyah	1993	7	86
4.	SDN Inpres Bumi Bahari	1978	13	268
5.	SDN 3 Inpres Lere	1985	11	258
6.	MIS Darul Iman	2005	3	115
7.	SMP Muhammadiyah 1	1971	12	40
8.	SMP 10	1986	51	625
9.	SMA 4	1976	76	1164
TOTAL			190	3.013

Sumber: Profil Kelurahan Lere, 2009

Disamping lembaga formal, juga terdapat lembaga pendidikan non formal yaitu kelompok bermain dan taman pendidikan Al-Qur'an. Adapun lembaga pendidikan formal yang ada di Kelurahan Lere adalah sebagai berikut.

Lembaga Pendidikan Non Formal

No	Nama Kelompok Bermain/Taman Pengajian	Lokasi	Jumlah Guru (Orang)	Jumlah Santri (Orang)
1.	TPA Mashita	RW 4	7	20
2.	TPA Almaidah	RW 1	2	30
3.	TPA Datul Kusra	RW 2	2	26
TOTAL			11	76

Sumber: Profil Kelurahan Lere, 2009

Tingginya kesadaran masyarakat Kelurahan Lere terhadap pentingnya pendidikan dalam kehidupan bermasyarakat membuat lebih banyak masyarakat Kelurahan Lere yang mengenyam pendidikan hal ini dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut.

Tingkat Pendidikan Masyarakat Kelurahan Lere

No.	Data Pendidikan	Jumlah	
1.	Belum sekolah	1.367	Orang
2.	Sementara sekolah	5.513	Orang
3.	Tidak pernah sekolah	1.344	Orang
4.	Tidak tamat SD	1.291	Orang
5.	Tamat SD/ sederajat	1.466	Orang
6.	SLTP/ sederajat	2.756	Orang
7.	SLTA/ sederajat	1.034	Orang
8.	Diploma	701	Orang
9.	S-1	70	Orang
10.	S-2	13	Orang
11.	S-3	2	Orang
TOTAL		14.523	Orang

Sumber: Profil Kelurahan Lere, 2009

Diantara masyarakat Kelurahan Lere yang mengenyam pendidikan juga ada masyarakat yang tidak sempat mengenyam pendidikan atau tidak tamat SD atau SR pada zaman penjajahan utamanya orangtua dan anak-anak yang hidup pada masa masih terbatasnya fasilitas pendidikan dan juga karena faktor ekonomi sehingga menjadikan mereka buta huruf atau aksara. Namun, demikian

pemerintah tetap berupaya agar tidak ada lagi masyarakat yang buta huruf atau aksara melalui berbagai program.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial Agama dan Budaya

Hampir semua suku yang ada di Indonesia terwakili oleh masyarakat Kelurahan Lere sehingga dalam berinteraksi masyarakat Lere menggunakan bahasa Indonesia, kecuali ketika terjadi komunikasi sesama suku. Akan tetapi bahasa Kaili merupakan bahasa yang sering terdengar dari masyarakat Lere yang merupakan suku Kaili asli tetapi juga dari suku-suku lain yang berupaya untuk menguasai bahasa Kaili yang memang mempunyai daya tarik tersendiri disamping sebagai wujud penghargaan terhadap suku yang lebih awal menetap. Prinsipnya adalah orang bijak mengatakan dimana bumi kita pijak disitu langit kita junjung. Ada beberapa suku yang ada di Kelurahan Lere yaitu sebagai berikut.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku/Etnis

Etnis/Suku	Jumlah	
Kaili	4.980	Orang
Bugis	2.150	Orang
Lainnya	2.173	Orang
Total	9.303	Orang

Sumber: Profil Kelurahan Lere, 2009

Kesenian yang dikenal masyarakat kelurahan Lere adalah tari jepeng dan rabana yang biasanya dilakukan apabila ada pesta pernikahan atau hari besar Islam. Selain itu, masyarakat Kelurahan Lere juga mengenal kesenian yang terbuat dari bambu dan biasanya digunakan untuk upacara penyematan juga digunakan dalam proses penyembuhan yang diiringi dengan gendang.

Olahraga merupakan pembentukan fisik yang sehat juga menjadi wadah pendidikan mental dan modal generasi muda sebagai pemegang tongkat estafet

perjuangan bangsa. Olehnya masyarakat Lere sangat memperhatikan penyediaan fasilitas olahraga secara swadaya seperti lapangan sepak bola, lapangan bulu tangkis, tenis meja, volley ball, takraw dan bela diri dengan memanfaatkan lokasi yang diberikan. Walaupun selama ini prasarana olahraga yang digunakan sudah memadai namun lapangan sepak bola masih perlu pembenahan. Adapun prasarana olahraga yang ada di Kelurahan Lere sebagai berikut.

Prasarana Olahraga

No.	Prasarana Olahraga	Jumlah (Unit)	Kondisi
1.	Lapangan sepak bola	2	Pembenahan
2.	Lapangan bulutangkis terbuka	-	Baik
3.	Gedung bulutangkis	1	Baik
4.	Lapangan volley	4	Baik
5.	Lapangan takraw	3	Baik
6.	Lapangan tenis lapangan	2	Baik

Sumber: Profil Kelurahan Lere, 2009

Persoalan kemiskinan menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Kelurahan Lere maupun pemerintah Kota Palu. disamping mensukseskan berbagai kebijakan pemerintah pusat dalam upaya pengentasan kemiskinan seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat – Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (PNPM-P2KP), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Beras Miskin (RASKIN), Asuransi Kesehatan Miskin (ASKESKIN), dan lain-lain, secara khusus pemerintah Kota Palu menetapkan tahun 2007 sebagai tahun peduli kaum dhuafa dan salah satu bentuk kebijakannya adalah setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) memasukkan program dan kegiatan yang menyentuh kepentingan kaum dhuafa.

Jumlah penduduk miskin di wilayah Kelurahan Lere sebanyak 332 kepala keluarga (982 jiwa) yang secara keseluruhan mendapatkan bantuan Beras Miskin 280 kepala keluarga (825 jiwa) diantaranya adalah keluarga pra sejahtera yang pernah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Adapun jumlah beras miskin yang diberikan kepada masyarakat Kelurahan Lere selama 4 tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Jumlah Beras Miskin

No.	Tahun	Jumlah (Kilogram)
1.	2006	7.040
2.	2007	7.040
3.	2008	4.980
4.	2009	8.400
Total		27.460

Sumber: Profil Kelurahan Lere, 2009

Pada awalnya wilayah Kelurahan Lere dihuni oleh satu etnis yaitu suku Kaili yang seluruhnya beragama Islam. Sifat keterbukaan dan kekeluargaan dari masyarakat Lere yang menjadikan berbagai suku bangsa dan pemeluk agama berkenaan untuk menetap di Kelurahan Lere. Adapun jumlah penduduk berdasarkan agama adalah sebagai berikut.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah
Islam	9.014 Orang
Kristen	186 Orang
Katholik	17 Orang
Hindu	37 Orang
Budha	49 Orang
Total	9.303 Orang

Sumber: Profil Kelurahan Lere, 2009

Sarana ibadah merupakan kebutuhan mutlak bagi pemeluk agama sebagai pusat kegiatan ibadah dan syiar agama. Syiar Islam yang merupakan agama

mayoritas di Kelurahan Lere sangat pesat perkembangannya. Salah satu indikatornya adalah terbangunnya masjid dan musholla di Kelurahan Lere dengan biaya sebagian besar adalah swadaya masyarakat. Sedangkan untuk pemeluk agama lainnya dalam melaksanakan ibadah masih menggunakan rumah tempat tinggal. Adapun nama masjid, lokasi, tahun berdiri dan luas masjid yang ada di Kelurahan Lere adalah sebagai berikut.

Nama, Lokasi, Tahun Berdiri dan Luas Masjid

No.	Nama Masjid	Lokasi	Tahun Berdiri	Luas
1.	Al-Maidah	RW 1	2005	8 x 15
2.	Al-Amin	RW 2	1962	20 x 22
3.	Al-Mubaraq	RW 3	2005	8 x 10
4.	Nurul Hasana	RW 4	1989	17 x 17
5.	Iqra	RW 6	1998	8 x 10
6.	Baitul Rahma	RW 5	1968	30 x 40

Sumber: Profil Kelurahan Lere, 2009

B. Pemberian Bantuan Dana Pemerintah Kepada Masyarakat Nelayan

Kelurahan Lere merupakan salah satu daerah di Kota Palu yang dekat dengan teluk Palu. Banyak masyarakat yang mengandalkan laut sebagai tempat mencari rezeki untuk biaya kehidupan sehari-hari. Dalam kegiatannya, masyarakat nelayan Kelurahan Lere masih tergolong dalam masyarakat miskin yang perlu uluran tangan dan bantuan dari pemerintah khususnya pemerintah Kelurahan Lere dan pemerintah Kota Palu.

Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan Kelurahan Lere adalah untuk membantu meringankan beban masyarakat nelayan yaitu berupa alat tangkap dan alat-alat yang dibutuhkan nelayan. Hal ini dikemukakan oleh Marsuki selaku Lurah Kelurahan Lere.

Iya, ada banyak bantuan yang kami berikan kepada nelayan-nelayan khususnya nelayan yang ada di Kelurahan lere ini. Bantuan itu ada bermacam-macam, ada yang dalam bentuk alat tangkap pancing, pukat, jala, mesin genset, katinting dan lain sebagainya. Lebih jelasnya nanti di wawancarai saja yang bagian penyuluh perikanan di Kelurahan Lere masalah jumlah dan tahun diberikan karena di kantor Kelurahan Lere ini ada pembagian tugas menurut tufoksinya. Yang intinya bantuan yang diberikan kepada nelayan ini adalah bentuk realisasi dari pemberantasan kemiskinan khususnya di lingkungan nelayan dan membantu meringankan beban dari masyarakat nelayan. Bantuan yang diberikan kepada nelayan ini, diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan.¹

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Nursidah selaku penyuluh perikanan di lingkungan kantor Kelurahan Lere:

Untuk bantuan pemerintah kepada masyarakat nelayan ini ada berbagai macam ada yang dalam bentuk alat tangkap pancing, pukat, jala, mesin genset, dan katinting. Bantuan-bantuan itu jumlahnya ada 30 itu bantuan yang diberikan pada tahun 2018 dari 30 bantuan ini ada 10 mesin genset, 10 katinting dan 10 jala. Hanya saja, bantuan yang kami berikan semuanya habis di telan bumi akibat tsunami yang terjadi pada tanggal 28 September 2018.²

Ia juga menambahkan bahwa:

Bantuan-bantuan alat tangkap yang hilang karena tsunami sudah mulai digantikan oleh pemerintah hanya saja, pemberian bantuan ini bertahap. Pada bulan ini kami baru memberikan bantuan berupa katinting, perahu dan jala. Rencananya, bulan april mendatang bantuan-bantuan alat tangkap lainnya akan dibagikan lagi.

Hal ini juga dibenarkan oleh Sahril selaku masyarakat nelayan yang berprofesi sebagai nelayan pemancing.

Bantuan-bantuan yang kami dapatkan pada tahun 2018 seperti pancing, pukat, katinting genset dan lain sebagainya hilang yang diakibatkan oleh tsunami. Hanya saja, pemerintah juga sudah mulai memberikan kami

¹Marsuki, lurah, *wawancara*, Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat tanggal 23 Januari 2019.

²Nursidah, Penyuluh perikanan, *wawancara*, Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat tanggal 31 Januari 2019.

bantuan pasca berupa bantuan katinting, perahu, jala dan lain sebagainya. Ada bantuan yang sudah kami terima setelah tsunami yang terjadi bantuan itu berupa katinting, perahu, dan jala. Namun, ada bantuan-bantuan lainnya seperti pukot, pancing dan genset ini akan diberikan pada bulan april 2019. Ini karena pemberian bantuan ini dilakukan bertahap tidak langsung serentak. Namun, bantuan yang diberikan pemerintah ini sangat bermanfaat bagi kelompok-kelompok nelayan. Walaupun alat-alat tangkap ini kami gunakan secara bergantian.³

Pemberian bantuan dana dilakukan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat nelayan. Dalam pelaksanaannya, ada beberapa langkah-langkah yang dilakukan sehingga pemberian bantuan dapat berjalan dengan semestinya dan sesuai yang direncanakan. Hal ini di kemukakan pula oleh Nursidah selaku Penyuluh perikanan.

Untuk masalah cara pemberian bantuan ini pertama kami melakukan pendataan mengenai pekerjaan yang dilakukan sehari-hari, kemudian kami mengusulkan kepada dinas yang mengurus bantuan-bantuan untuk kelompok nelayan yaitu Dinas Perikanan. Namun dalam pengusulan bantuan ini kami dari pihak pemerintah Kelurahan Lere terlebih dahulu membuat kelompok-kelompok nelayan sehingga penerimaan bantuan ini dalam bentuk kelompok. Kemudian setelah semua bantuan itu di acc barulah dilakukan pemberian bantuan yang sudah berupa alat tangkap, mesin genset, katinting dan lain sebagainya. Dalam memberikan bantuan ini, kami dari pihak pemerintah memberikan bantuan sesuai kebutuhan masyarakat serta dalam pemberian bantuan ini ada yang bertugas untuk mengawasi pemberian bantuan untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan contohnya agar tidak ada yang disembunyikan dalam artian korupsi atau penggelapan alat tangkap dan mesin-mesin sehingga ini merugikan Negara.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Ahyar selaku nelayan yang berprofesi sebagai nelayan bagang.

Seperti yang dikatakan Nursidah selaku penyuluh perikanan Kelurahan Lere, bahwa pemberian bantuan ini bentuknya alat tangkap. Adapun cara pemerintah memberikan bantuan ini dengan pertama melakukan pendataan yaitu mendata masyarakat nelayan yang berprofesi sehari-hari baik nelayan pancing, nelayan bagang maupun nelayan pukot. Kemudian

³Sahril, masyarakat, *wawancara*, Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat tanggal 31 Januari 2019.

pemerintah Kelurahan Lere mengusulkan kepada Dinas Perikanan agar dapat diberikan bantuan berupa alat tangkap, mesin genset, katinting dan lain sebagainya. Hanya saja, sebelum diajukan kepada Dinas Perikanan terlebih dahulu pemerintah Kelurahan Lere membuat kelompok nelayan sehingga pengajuan pemberian bantuan ini berupa kelompok bukan perorangan. Cara kami menggunakan bantuan yang diberikan ini adalah dengan melakukan pergantian melaut sehingga semua anggota kelompok nelayan dapat menikmati bantuan yang diberikan dari pemerintah. Serta dalam pemberian bantuan ini ada yang mengawasi sehingga tidak ada yang disembunyikan oleh pemerintah kepada kami ataupun sebaliknya.⁴

Kebijakan pemerintah adalah rangkain konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Bantuan sosial untuk nelayan merupakan pemberian bantuan berupa barang dari pemerintahan daerah kepada individu, kelompok, keluarga atau masyarakat melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Namun, pemberian bantuan untuk nelayan terutama di Kelurahan Lere tidak hanya dari kalangan pemerintah Kelurahan Lere atau dari Dinas Perikanan. Tetapi, juga ada yang berasal dari luar seperti yang dikemukakan oleh Nursidah bahwa:

Sebenarnya bantuan-bantuan yang diberikan untuk nelayan ada yang berasal dari luar pemerintah Kelurahan Lere dan Dinas Perikanan. Bantuan itu diberikan dari bank Indonesia. Bantuan itu berupa alat tangkap pancing

⁴Ahyar, masyarakat, *wawancara*, Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat tanggal 31 Januari 2019.

10 buah, alat tangkap pukat 5 buah, alat tangkap 5 buah, mesin genset 2 buah dan katinting 3 buah. Bantuan ini diberikan langsung dari pihak BI melalui Pemerintah Kelurahan Lere serta bantuan ini kami berikan kepada kelompok-kelompok nelayan yang ada di Kelurahan Lere.

Hal ini dibenarkan oleh Idris selaku masyarakat nelayan yang berprofesi sebagai nelayan pukat bahwa:

Ada juga bantuan yang diberikan dari luar pemerintah Kelurahan Lere dan Dinas Perikanan. Bantuan itu diberikan dari Bank Indonesia. Bantuan itu berupa alat tangkap pancing 10 buah, alat tangkap pukat 5 buah, alat tangkap jala 5 buah, mesin genset 2 buah dan katinting 3 buah. Bantuan ini diberikan langsung dari pihak BI melalui Pemerintah Kelurahan Lere serta bantuan ini diberikan kepada kami kelompok-kelompok nelayan yang ada di Kelurahan Lere baik kelompok nelayan pancing, kelompok nelayan pukat maupun kelompok nelayan bagang.⁵

Pemberian bantuan Pemerintah Kelurahan Lere dapat membantu perekonomian masyarakat nelayan. Pemberian bantuan pemerintah Kelurahan Lere kepada masyarakat nelayan dilakukan dengan pendataan masyarakat nelayan sesuai profesi, kemudian sebelum mengajukan bantuan kepada pihak Dinas Perikanan terlebih dahulu membentuk kelompok-kelompok nelayan, setelah bantuan yang diajukan tersebut diacc oleh pihak Dinas Perikanan berupa bantuan alat tangkap nelayan seperti pancing, pukat, bagang, mesin genset dan katinting.

Pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan dilakukan secara terbuka antara masyarakat nelayan sebagai penerima bantuan dan pemerintah Kelurahan Lere sebagai pemberi bantuan serta ada pengawas dari pihak kepolisian yang mengawasi pemberian bantuan tersebut. Sehingga, pemberian bantuan ini tidak ada yang disembunyikan baik dari pihak pemerintah Kelurahan Lere sebagai pihak pemberi bantuan maupun masyarakat nelayan sebagai penerima bantuan.

⁵Idris, masyarakat, *wawancara*, Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat tanggal 31 Januari 2019.

Bantuan yang berasal dari pemerintah Kelurahan Lere ada sebanyak 30 buah dengan rincian 10 mesin genset, 10 katinting dan 10 jala.

Namun, pada saat pendistribusian bantuan-bantuan untuk masyarakat nelayan tersebut tidak ada dilakukan pengawasan. Hal ini bisa menjadi celah untuk melakukan kecurangan. Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah hanya pada waktu pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan. Hal ini masih kurang efektif pada tahapan pendistribusian bantuan tersebut.

Selain itu, ada juga bantuan-bantuan yang berasal dari luar pemerintah Kelurahan Lere yaitu, bantuan yang diberikan dari pihak Bank Indonesia berupa alat tangkap pancing 10 buah, alat tangkap pukat 5 buah, alat tangkap jala 5 buah, 2 mesin genset serta 3 katinting. Bantuan-bantuan ini diberikan dalam bentuk kelompok-kelompok nelayan. Cara penggunaan bantuan tersebut dengan cara berganti-gantian melaut sehingga seluruh anggota kelompok dapat menikmati dan merasakan bantuan yang telah diberikan dari pemerintah Kelurahan Lere.

C. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pemberian Bantuan Dana Pemerintah Kepada Masyarakat Nelayan

Masyarakat nelayan Kelurahan Lere termasuk dalam kategori masyarakat yang kurang mampu dan masih butuh bantuan uluran tangan dari pemerintah. Pemerintah sebagai orang yang diberi amanah sudah semestinya menjalankan amanahnya dengan semestinya contohnya seperti mensejahterakan masyarakatnya dengan menggunakan cara tersendiri yaitu pertama mendekati kemudian melakukan sosialisasi dan yang terakhir memberikan bantuan-bantuan yang

dibutuhkan oleh masyarakat khususnya masyarakat nelayan yang berada di Kelurahan Lere.

Pemerintah Kelurahan Lere melalui penyuluh perikanan yang ada di Kelurahan Lere telah melaksanakan tugas untuk memberikan bantuan secara adil yaitu dengan memberikan bantuan kepada masyarakat sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat nelayan tersebut. Hanya saja, pemberian bantuan ini belum efektif untuk setiap orang dari anggota kelompok nelayan tersebut. Hal ini senada yang dikemukakan oleh Ahyar.

Sebenarnya, bantuan yang diberikan oleh pemerintah ini masih kurang efektif karena bantuan yang diberikan hanya untuk setiap kelompok nelayan yang beranggotakan beberapa orang. Hal ini, kami rasakan masih kurang efektif apabila menggunakan bantuan tersebut harus bergantian dengan anggota kelompok lainnya. Hal ini yang membuat bantuan yang diberikan tidak efektif untuk seluruh anggota kelompok nelayan kesannya kurang adil untuk digunakan seluruh anggota kelompok.

Hal ini juga telah di atur dalam Qs. Al-Hujjarat (49): 9 sebagai berikut.

وَإِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَخْتَلَوْا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ط فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
 الْأُخْرَى فَقْتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ق فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا
 بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ط إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Terjemahnya:

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil.⁶

⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Cet 3, Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), 469.

Ayat ini menjelaskan tentang anjuran agar kita harus mendamaikan orang yang sedang berselisih serta selalu berlaku adil dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih. Dalam setiap kegiatan manusia yang dilaksanakan tentu ada aturan-aturan yang mengatur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sama halnya dengan kegiatan pemerintahan haruslah sesuai dengan aturan agama Islam yang merujuk pada Al-Qur'an dan Hadits agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan salah satunya adalah korupsi.⁷

Hakikatnya, dalam menjalankan kegiatan pemerintahan sudah ada rambu-rambu yang mengatur segala kegiatan tersebut dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Namun, dalam kenyataannya masih ada oknum-oknum yang menggunakan cara-cara tertentu dalam pemerintahan untuk mendapatkan keuntungan dengan tidak sesuai prosedur dan melanggar undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pemerintah tidak hanya dijerat dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia tetapi juga terjerat dalam undang-undang yang berlaku dalam Al-Qur'an. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah dalam Qs. Al-Anfaal (8): 27 berikut.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنَاتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٢٧﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.⁸

⁷Syaikh Ahmad Mustafa A-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i*, (Ed.3; Cet.1 Jakarta: Almahira, 2007), 408.

⁸*Ibid*, 163.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kelurahan Lere menjalankan kegiatan pemerintahan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Dalam menjalankan amanah yang di tanggung, ada pembagian-pembagian tugas agar untuk mensejahterakan masyarakat terutama nelayan-nelayan yang ada di Kelurahan Lere. Nelayan Kelurahan Lere merupakan nelayan yang masih membutuhkan bantuan dari pemerintah.

Kenyataannya, pemerintah telah menjalankan amanah yang di berikan salah satunya dengan melakukan pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan yang ada di Kelurahan Lere. Dalam pemberian bantuan ini, pemerintah Kelurahan Lere pertama memastikan hal-hal yang diperlukan oleh nelayan, kemudian memberikan sosialisasi dan membentuk kelompok-kelompok nelayan yang akan diberikan bantuan dari dinas Perikanan jika telah di acc oleh pihak dinas yang terkait.

Namun, pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan ini dirasakan masih kurang efektif untuk digunakan oleh seluruh anggota kelompok yang beranggotakan 5-6 orang dengan menggunakan bantuan untuk 1 orang. Pada saat menggunakan bantuan alat tangkap tersebut haruslah seluruh anggota kelompok dapat merasakan manfaat dari bantuan tersebut. Akan tetapi, hal ini kurang menguntungkan untuk setiap orang dari anggota kelompok karena apabila seorang anggota kelompok menggunakan bantuan tersebut dan belum mendapatkan hasil tangkapan dan harus dipakai lagi untuk anggota kelompok lain. Hal ini yang merupakan kurang efektif untuk setiap anggota kelompok.

Bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah anggota kelompok. Dari setiap kelompok yang beranggotakan 5-6 orang hanya diberikan bantuan 1 unit pada setiap kelompok. Artinya, masing-masing anggota kelompok harus memakai bantuan alat-alat tangkap tersebut secara bergantian. Hal ini dirasakan masih kurang efektif. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu *at-taradhi*. Sesuai dengan firman Allah Qs. Fusillat (41): 42 berikut.

لَا يَأْتِيهِ الْبَطْلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۗ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

Terjemahnya:

Yang tidak datang kepadanya (Al-Qur'an) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji.⁹

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya saja, dalam sistem ekonomi ini nilai-nilai Islam menjadi landasan utama dan dasar pada setiap aktivitasnya.

Sebagai ajaran yang komprehensif, hukum ekonomi Islam dibangun atas dasar kaidah fiqih mu'amalah, qawaid fiqih dan falsahah hukum Islam oleh Al-Qur'an dan sunah adalah halal. Dengan demikian sebagian besar para pakar ekonomi muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek yang menghindari segala transaksi yang mengandung riba (bunga), maisir (judi), gharar (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bathil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada aspek efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada

⁹ *Ibid*, 436.

produk-produk yang dilarang dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal soleh lainnya.

Pemerintah Kelurahan Lere telah menjalankan amanahnya dengan memberikan bantuan kepada masyarakat nelayan berupa alat tangkap pancing, pukat, jala, mesin genset dan katinting. Dalam pemberian bantuan tersebut, pemerintah memberikan sesuai kebutuhan masyarakat nelayan. Pemberian bantuan tersebut tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam untuk jumlah bantuan serta pada saat pendistribusian alat-alat tangkap tersebut tidak dilakukan pengawasan.

Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian yang menjadi bidang kajian terpenting dalam perekonomian. Distribusi menjadi posisi penting dari teori mikro dan makro Islam karena pembahasan dalam bidang distribusi ini tidak hanya berkaitan dengan ekonomi belaka tetapi juga aspek sosial dan politik sehingga menjadi perhatian bagi aliran pemikir ekonomi Islam dan konvensional saat ini.¹⁰ Distribusi merupakan salah satu aktivitas perekonomian manusia, di samping produksi dan konsumsi. Dorongan Al-Qur'an pada sektor distribusi telah dijelaskan secara eksplisit. Ajaran Islam menuntun kepada manusia untuk menyebarkan hartanya agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan-golongan kecil. Dalam pandangan Islam, pendistribusian harta yang tidak adil dan merata akan membuat orang yang kaya bertambah kaya dan yang miskin semakin miskin.

Dalam pemberian bantuan ini juga tidak ada yang di sembunyikan atau di spekulasi oleh pemerintah Kelurahan Lere namun, pada saat distribusi tidak

¹⁰ Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), 26.

dilakukan pengawasan yang ditakutkan akan terjadi spekulasi dan kecurangan pada saat pendistribusian bantuan alat-alat tangkap sehingga dapat memperkaya golongan-golongan kecil dan merugikan orang lain. Hal ini juga dijelaskan dalam dengan firman Allah dalam Qs. An-Nisa (4): 29 berikut.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹¹

Sebenarnya, ada beberapa macam gharar dalam pembagiannya yaitu sebagai berikut.

1. Gharar dalam sighthat akad

Gharar dalam sighthat akad dibagi dalam bagian yaitu sebagai berikut.

- a. Dua jual beli dalam satu jual beli
- b. Jual beli urban
- c. Jual beli munazabah
- d. Jual beli hazah
- e. Jual beli mulamasah
- f. Aqad yang digantungkan dan aqad yang disandarkan

2. Gharar dalam benda yang berlaku pada akadnya

¹¹*Ibid*, 76.

Gharar dalam benda yang berlaku pada akadnya dibagi menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut.

- a. Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
 - b. Ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
 - c. Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan
 - d. Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
 - e. Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
 - f. Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga
 - g. Ketidakjelasan kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan
 - h. Transaksi pada benda yang tidak ada
 - i. Tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan
3. Gharar dilihat dari peristiwanya

Gharar dilihat dari peristiwanya terbagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut.

- a. Jual beli barang yang belum ada seperti jual beli habal (janin dari hewan ternak)
- b. Jual beli barang yang tidak jelas seperti penjualan tanah yang belum diketahui ukurannya
- c. Jual barang yang tidak mampu diserahkan seperti jual beli budak yang kabur.¹²

Tidak sesuai gharar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tidak memberikan bantuan atau melakukan transaksi antara pemerintah Kelurahan Lere

¹²Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 25.

dengan masyarakat nelayan dengan kejelasan benda yang diberikan serta jumlah dan waktu memberikan sesuai dengan prosedur. Pemberian bantuan pemerintah ini juga sesuai dengan kemampuan sehingga kesannya pemerintah tidak memaksakan kehendak dan kemampuan yang dimiliki.

Dalam pemberian bantuan ini juga ada pengawasan bukan hanya dari Allah SWT. tetapi juga dari pihak kepolisian yang bertugas agar pemberian bantuan itu tidak terjadi spekulasi antara pemerintah dan masyarakat nelayan. Pemerintah yang takut kepada Allah SWT. tidak akan melakukan spekulasi meski tidak adanya pengawasan dari pihak kepolisian. Hal ini sesuai firman Allah dalam Qs. Luqman (31): 33 berikut.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَحْشَوْا يَوْمًا لَا تَجْزِي وَالِدٌ عَنِ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ
جَازٍ عَنِ وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا
يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿٣٣﴾

Terjemahnya:

Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutilah suatu hari yang (pada hari itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat (pula) menolong bapaknya sedikitpun. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan jangan (pula) penipu (syaitan) memperdayakan kamu dalam (mentaati) Allah.¹³

Pemberian bantuan dana pemerintah Kelurahan Lere kepada masyarakat nelayan dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi dan mendata masyarakat nelayan yang kurang mampu sesuai dengan profesinya masing-masing, kemudian membuatkan kelompok-kelompok nelayan, kemudian mengajukan bantuan-bantuan kepada dinas perikanan yang ada. Setelah mengajukan pemberian

¹³Ibid, 376.

bantuan, kemudian dinas terkait akan melakukan penyaringan dan setelah itu bantuan yang diajukan diacc dan pemberian bantuan tersebut dalam kelompok-kelompok nelayan yang ada di Kelurahan Lere. Bantuan-bantuan itu berupa alat tangkap pancing, pukot, jala, mesin genset, dan katinting. Pemberian bantuan ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, pemberian bantuan kepada masyarakat dilakukan pengawasan dari pihak kepolisian sedangkan pada saat pendistribusian tidak dilakukan pengawasan serta tsunami yang terjadi tanggal 28 september 2018 lalu telah merusak bantuan-bantuan yang telah diberikan kepada nelayan dari beberapa tahun lalu. Namun, pemerintah sementara memperbaiki perekonomian masyarakat khususnya nelayan Kelurahan Lere pasca bencana. Bantuan-bantuan yang diberikan pasca bencana berupa perahu, katinting, pukot dan jala. Sebenarnya masih banyak lagi bantuan-bantuan untuk nelayan yang akan diberikan. Namun, pemberian bantuan ini dilakukan bertahap.

Pemberian bantuan dana pemerintah kepada masyarakat nelayan ini sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena dalam cara pemberian bantuan ini, pemerintah memberikan sesuai kebutuhan nelayan. Namun, untuk jumlah bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam karena jumlah bantuan yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah penerima bantuan dan hal ini dapat membuat konflik antara masyarakat penerima bantuan karena kurangnya keadilan dalam pemberian bantuan tersebut. Serta dalam pemberian bantuan ini ditakutkan terjadi spekulasi atau penipuan pada tahap pendistribusian bantuan-bantuan alat tangkap tersebut. Kesimpulannya adalah pemberian bantuan kepada

masyarakat nelayan Kelurahan Lere sesuai dengan perspektif ekonomi Islam dalam pelaksanaannya. Namun, untuk jumlah bantuan dan tahap pendistribusian tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas dapat di tarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut.

1. Pemberian bantuan dana kepada masyarakat nelayan merupakan salah satu aplikasi dari tujuan pemerintah mensejahterakan masyarakat terutama untuk masyarakat nelayan. Pemberian bantuan dana pemerintah kepada masyarakat nelayan dilakukan dengan pertama melakukan pendataan dan sosialisasi dengan masyarakat sesuai dengan profesinya masing-masing untuk mengetahui yang dibutuhkan oleh setiap nelayan, kemudian membentuk kelompok-kelompok nelayan bagi yang sudah di data, kemudian mengajukan pemberian bantuan melalui penyuluh perikanan Kelurahan Lere kepada dinas perikanan. Setelah pengajuan bantaun untuk masyarakat nelayan diacc, kemudian bantuan untuk masyarakat nelayan akan dibagikan kepada masing-masing kelompok bukan untuk perorangan. Pemberian bantuan diawasi oleh kepolisian agar tidak adanya spekulasi antara pemerintah dan masyarakat nelayan. Bantuan kepada masyarakat nelayan berupa bantuan alat tangkap pancing, pukot, jala, genset dan katinting. Hanya saja, bantuan-bantuan itu telah di telan oleh bumi akibat tsunami yang terjadi beberapa waktu lalu. Pemerintah telah berusaha untuk memperbaiki perekonomian nelayan dengan memberikan bantuan secara bertahap.

2. Pemberian bantuan pemerintah Kelurahan Lere kepada masyarakat nelayan ini merupakan suatu hal yang baik untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat khususnya masyarakat nelayan. Pemberian bantuan ini ternyata dapat membantu masyarakat Kelurahan Lere. Pemberian bantuan ini dilakukan dengan tidak adanya pemaksaan. Serta dalam pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat tidak terjadi spekulasi atau dalam ekonomi Islam dikenal dengan *gharar* antara pemerintah dan masyarakat. Hanya saja, jumlah bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan tidak sesuai dengan jumlah anggota kelompok serta pada tahapan pendistribusian tidak dilakukan pengawasan yang ditakutkan pada tahapan ini terjadi spekulasi. Secara keseluruhan pemberian bantuan dana pemerintah Kelurahan Lere kepada masyarakat nelayan sesuai dengan perspektif ekonomi Islam pada tahapan pemberian bantuan kepada masyarakat namun, untuk jumlah bantuan dan tahapan pendistribusian bantuan tersebut tidak sesuai dengan perspektif ekonomi Islam.

B. Saran

1. Saran penulis kepada pemerintah adalah agar meningkatkan jumlah bantuan-bantuan yang diberikan untuk setiap kelompok.
2. Saran penulis kepada penyuluh perikanan adalah lebih meningkatkan pengawasan pada tahapan distribusi bantuan-bantuan tersebut.

3. Saran penulis kepada masyarakat adalah harus berlaku adil dalam penggunaan bantuan yang diberikan dari pemerintah dan menjaga sebaik-baiknya bantuan yang telah diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Cet III, Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Abbas, Anwar. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Agustino. *Dasar-Dasar kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Ahyar. Masyarakat. *Wawancara*. Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat tanggal 31 Januari 2019.
- Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ali, Zainudin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Ed; I, Cet; II Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Alwi Hasan dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Departemen Pendidikan*. Ed. 3; Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Budi. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Perssindo, 2005.
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, *Kearifan Tradisional Masyarakat Nelayan Kampung Batunderang*. Selawesi Utara: Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, 2009.
- Fajrie, Mahfudlah. *Masyarakat Pesisir wedung Jawa Tengah*. CV: Mangku bumi Media, 2016.
- Husein, Machnun. *Etika Pembangunan dalam Pemikiran Islam di Indonesia*. Ed.1; Cet.1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1986.
- Idris. Masyarakat. *Wawancara*. Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat tanggal 31 Januari 2019.
- Khaliq, Abdul Farid. *Fiqh Politik Islam*. Cet.1 Jakarta: sinar Grafika, 2009.
- Kusnadi. *Membela Nelayan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Magfira. *Peningkatan Ekonomi Masyarakat Nelayan Kayu Jati Melalui Bantuan Dana Pemerintah Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. 2011. Skripsi IAIN Palu. tidak dipublikasikan.

- Manan, Abd. *Hukum Ekonomi syariah dalam Kemenangan Peradilan Agama*. Ed. 1; Cet.1 Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2012.
- Mardani. *Hukum sistem ekonomi Islam*. Ed.1; Cet.1 Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2015.
- Marsuki. Lurah. *Wawancara*. Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat tanggal 23 Januari 2019.
- Miles B. Matthew dan A. Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif, Buku Tentang Metode-Metode Baru*. Cet. I Jakarta: UI-Press, 1992.
- Millos, B. Matthew dkk. *Qualitative data Analisis diterjemahkan oleh Tjetjep Rohidi dengan judul Analisis data Kualitatif, buku sumber tentang metode baru*. Cet. I Jakarta: UI-Press, 1992.
- Morrisan, dkk. *Metode Penelitian Survei*. Ed.1 Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Ed.1; Cet.1 Jakarta: Kencana, 2016.
- Narbukon Cholid dan Abu Achmadi, *metodologi penelitian*.Cet.4 Jakarta: PT. Bumi aksara,2002.
- Nasution. *Metode Research*. Ed.1; Cet.2 Jakarta : Bumi Aksara,1996.
- Nursidah. Penyuluh perikanan. *Wawancara*. Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat tanggal 31 Januari 2019.
- Rahmatulliza. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Pelabuhan Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Krui Kabupaten Pesisir Barat*.Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017), 38. Skripsi tidak dipublikasikan.
- Rais, Amien M. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Cet.1; Yogyakarta: Aditya Media, 1995.
- Rindawati, Septi. “Strategi Peningkatan Masyarakat Nelayan Di Kota Bengkulu, “*Jurnal Ekonomi Dan Informasi Akuntansi (Jenius)*”, vol.2 no.3 (September 2012), 293. <http://news.palcomtech.com/wp-content/uploads/2013/04/SEPTI-JE02032012.pdf>. di akses tanggal 16 agustus 2018.
- R Pari Suparto. *Upaya Peningkatan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Nelayan Desa Palapi Kecamatan Moutong Kabupaten Parigi Moutong (Paradigma ekonomi Islam)*. 2004. Skripsi IAIN Palu. tidak dipublikasikan.

- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian: Public Relations & Komunikasi*. Ed; 1 Cet;3 Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sahril. Masyarakat. *Wawancara*. Kelurahan Lere Kecamatan Palu Barat tanggal 31 Januari 2019.
- Salim, Mu'in Abd. *Fiqh siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Ed. 1; Cet.3 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Satria, Arif. *Pengantar sosiologi Masyarakat Pesisir*. Ed.1; Cet. 2 Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Sholahuddin, M. *Asas-asas Ekonomi Islam*. Ed.1; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sumar'in. *Ekonomi Islam: sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Prespektif Islam*. Ed.1; Cet.1; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Sudaryono. *Metodologi Penelitian*. Ed. 1; Cet. 1 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kuantitatif*. Cet. 1 Bandung: Alfabeta, 2012.
- Yulistriani, Merlian. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus di Desa Dadap – Indramayu)*. 2011. skripsi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. tidak dipublikasikan.
- Al-Farran, Ahmad Mustafa Syaikh. *Tafsir Imam Syafi'i*. Ed.3; Cet.1 Jakarta: Almahira, 2007.

LAMPIRAN 1. Pedoman Wawancara

1. Lurah:
 - a. Apakah ada bantuan pemerintah kepada masyarakat nelayan sebelum terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018?
 - b. Jenis bantuan apakah yang diberikan kepada masyarakat nelayan?
 - c. Apakah dengan pemberian bantuan dana kepada masyarakat nelayan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat nelayan kelurahan Lere?
 - d. Bagaimana kondisi bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan Kelurahan Lere setelah terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi tanggal 28 September 2018?
 - e. Apakah ada bantuan yang diberikan lagi kepada masyarakat nelayan Kelurahan Lere setelah terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi tanggal 28 September 2018?
 - f. Apakah setelah terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi tanggal 28 September 2018 masih ada masyarakat kelurahan Lere yang ikut kegiatan nelayan?
 - g. Bagaimana keadaan kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan setelah terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018?
 - h. Apakah yang dilakukan pemerintah Kelurahan Lere dalam membantu memperbaiki perekonomian masyarakat nelayan Kelurahan Lere?
2. Penyuluh perikanan Kelurahan Lere:
 - a. Apakah ada bantuan pemerintah kepada masyarakat nelayan sebelum terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018?
 - b. Berapa banyak bantuan pemerintah yang diberikan kepada masyarakat nelayan Kelurahan Lere sebelum terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018?
 - c. Jenis bantuan apakah yang diberikan kepada masyarakat nelayan?
 - d. Tahun berapakah bantuan itu diberikan?

- e. Bagaimana cara pemberian bantuan kepada masyarakat nelayan Kelurahan Lere?
 - f. Apakah bantuan-bantuan tersebut hanya berasal dari pemerintah Kelurahan Lere atau ada yang berasal dari luar?
 - g. Apakah dengan pemberian bantuan dana kepada masyarakat nelayan dapat memperbaiki perekonomian masyarakat nelayan kelurahan Lere?
 - h. Bagaimana kondisi bantuan yang diberikan kepada masyarakat nelayan Kelurahan Lere setelah terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi tanggal 28 September 2018?
 - i. Apakah ada bantuan yang diberikan lagi kepada masyarakat nelayan Kelurahan Lere setelah terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi tanggal 28 September 2018?
 - j. Apakah setelah terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018 masih ada masyarakat kelurahan Lere yang ikut kegiatan nelayan seperti biasanya?
 - k. Bagaimana keadaan kehidupan sehari-hari masyarakat nelayan setelah terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018?
 - l. Apakah yang dilakukan pemerintah Kelurahan Lere dalam membantu memperbaiki perekonomian masyarakat nelayan Kelurahan Lere?
3. Masyarakat penerima bantuan berupa alat tangkap pancing:
- a. Apakah ada bantuan pemerintah kepada bapak sebelum terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi tanggal 28 September 2018?
 - b. Jenis bantuan apakah yang bapak terima?
 - c. Tahun berapakah bantuan itu bapak terima?
 - d. Bagaimana cara pemberian bantuan pemerintah Kelurahan Lere kepada bapak?
 - e. Apakah pemberian bantuan dari pemerintah dapat memperbaiki perekonomian bapak?
 - f. Apakah setelah terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi tanggal 28 September 2018 bapak masih menerima bantuan dari pemerintah?

- g. Bantuan seperti apakah yang bapak terima dari pemerintah Kelurahan Lere?
 - h. Apakah bantuan yang diberikan dari pemerintah sudah efektif?
4. Masyarakat penerima bantuan berupa alat tangkap pukat:
- a. Apakah ada bantuan pemerintah kepada bapak sebelum terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018?
 - b. Jenis bantuan apakah yang bapak terima?
 - c. Tahun berapakah bantuan itu bapak terima?
 - d. Bagaimana cara pemberian bantuan pemerintah Kelurahan Lere yang diberikan kepada bapak?
 - e. Apakah pemberian bantuan dari pemerintah dapat memperbaiki perekonomian bapak?
 - f. Bagaimana kondisi bantuan alat tangkap yang bapak terima dari pemerintah Kelurahan Lere sebelum sebelum terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018?
 - g. Apakah bapak masih menerima bantuan dari pemerintah setelah sebelum terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018?
 - h. Bantuan seperti apakah yang bapak terima?
 - i. Apakah bapak masih melakukan kegiatan nelayan setelah terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018?
 - j. Apakah bantuan yang diberikan dari pemerintah sudah efektif?
5. Masyarakat penerima bantuan nelayan bagan:
- a. Apakah ada bantuan pemerintah kepada bapak sebelum terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018?
 - b. Jenis bantuan apakah yang bapak terima?
 - c. Tahun berapakah bantuan itu bapak terima?
 - d. Bagaimana cara pemberian bantuan pemerintah Kelurahan Lere yang diberikan kepada bapak?
 - e. Apakah pemberian bantuan dari pemerintah dapat memperbaiki perekonomian bapak?

- f. Bagaimana kondisi bantuan alat tangkap yang bapak terima dari pemerintah Kelurahan Lere sebelum sebelum terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018?
- g. Apakah bapak masih menerima bantuan dari pemerintah setelah sebelum terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018?
- h. Bantuan seperti apakah yang bapak terima?
- i. Apakah bapak masih melakukan kegiatan nelayan setelah terjadinya gempa, tsunami, dan liquifaksi yang terjadi tanggal 28 September 2018?
- j. Apakah bantuan yang diberikan dari pemerintah sudah efektif?

LAMPIRAN 2. Bantuan-bantuan yang diberikan pasca tsunami





LAMPIRAN 3. Wawancara dengan Lurah





LAMPIRAN 4. Wawancara bersama penyuluh perikanan



LAMPIRAN 5. Wawancara dengan masyarakat



Lampiran 6. Foto bersama penyuluh perikanan, masyarakat dan polisi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, “Pemberian Bantuan Dana Pemerintah Kepada Masyarakat Nelayan Kelurahan Lere Menurut Perspektif Ekonomi Islam” bernama lengkap Arif Rahman NIM: 13.3.12.0004, Anak pertama dari dua orang bersaudara dari pasangan Bapak Drs. Abdul Rahman, S.Pd dan Ibu Hj. ST. Fatimah, S.Pd yang lahir pada tanggal di Provinsi Sulawesi Tengah. Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri 04 Palu pada tahun 2000-2006 Sampai ,Penulis menempuh pendidikan di SMP Negeri 03 Palu, di tahun 2006-2009, kemudian penulis melanjutkan pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 04 Palu 2009-2012. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2012, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu melalui jalur seleksi Lokal dan lulus di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Islam hingga tahun 2019.